



info indonesia

● TABLOID REFERENSI PEMILU 2024 ●

MINGGU III NOVEMBER 2023

Harga @Rp 20.000,-



Road to
Election
2024

1

2

3

PEMILU 2024 RIANG GEMBIRA

ANIES-
MUHAIMIN
ADALAH DWI
TUNGGAL

PRABOWO-
GIBRAN
MENATAP
KEMENANGAN

GANJAR-MAHFUD
WASPADA
DRAKOR POLITIK

PENGALAMAN
DAN JARINGAN
MODAL
MENANGKAN
GANJAR

OPTIMISTIS MENANG
SATU PUTARAN

NYALEG KARENA
URUSAN UMAT



“Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye yang berperspektif hak anak ini mencerminkan komitmen penyelenggara Pemilu dan pemerintah dalam memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak”

Sylvana Maria Apituley



Pemilu Riang Gembira

Suasana kebatinan masyarakat Indonesia jelang Pilpres 2024 jauh berbeda dari 2019 lalu. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden membuat masyarakat semakin banyak pilihan untuk memilih yang terbaik. Semuanya baik, semuanya putra terbaik bangsa.

Sehingga tidak perlu berebut simpati dengan menjatuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Masyarakat tidak perlu terpecah belah seperti pada 2019. Sungguh suasana Pemilu 2024 ini jauh berbeda.

Perbedaan hingga saling membenci seperti tidak dirasakan masyarakat. Tidak suka nomor satu, bisa pilih dua dan tiga. Tidak tertarik nomor dua, ada pilihan di nomor satu dan nomor tiga. Ada banyak pilihan tanpa harus menjatuhkan.

Suasana riang gembira ini sungguh dirasakan masyarakat. Perseteruan mungkin hanya dirasakan para elit politik yang memang punya banyak kepentingan di Pilpres 2024. Sementara bagi rakyat, mereka hanya memilih sesuai hati nurani.

Rakyat sebetulnya tidak peduli dengan semua perbedaan-perbedaan yang selama ini diributkan para elit politik. Sehingga yang membuat gaduh politik sesungguhnya bukan rakyat, tapi para politisi-politisi sarat kepentingan.

Politik dinasti, isu korupsi, dan politik identitas hanyalah gembosan-gembosan para elit politik untuk menjatuhkan para pesaingnya.

Sementara bagi masyarakat, mereka tidak peduli semua itu. Kalau suka Prabowo-Gibran ya mereka memilih nomor tiga tanpa melihat politik dinasti, anak ingusan, suka emosian atau hal-hal buruk lainnya. Mereka hanya melihat sisi positifnya.

Begitu juga kalau suka dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tidak perlu pakai drama-drama politik seperti yang dipertontonkan para politisi saat ini.

Sebagai yang disampaikan para calon presiden saat ini, mereka ingin politik riang gembira, bukan politik pecah belah seperti 2019 lalu.

Bahkan, sekarang terlihat jelas siapa pemain politik pecah belah yang selalu berharap situasi politik Indonesia gaduh. Sekarang mereka sepertinya tidak laku lagi dan ini sebuah kemajuan bagi demokrasi Indonesia.

Tidak perlu saling menjatuhkan atau memfitnah karena siapapun yang terpilih semuanya putra terbaik bangsa. Mereka terpilih tentu lewat seleksi ketat, walaupun ada yang menuding dapat privilege sesungguhnya itu menjadi salah satu keunggulan.

Sikap tidak saling menjatuhkan ini juga menjadi salah satu sikap kami di Info Indonesia. Kami memberikan ruang dan kesempatan kepada siapapun untuk menumpahkan semua isi hati dan pandangan politiknya di Pemilu 2024.

Di sisi lain, kami juga terus mendesak agar lembaga penyelenggara Pemilu untuk terus bertindak netral. Sikap netral ini menjadi kekhawatiran peserta Pemilu, baik di Pilpres dan Pileg 2024.

Sikap netralitas dari Bawaslu, KPU dan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bahasan kami di Info Indonesia kali ini. Selamat membaca!!!



“Langsung kita bergerak dengan angka 01”

Anies Baswedan

ANIES-MUHAIMIN ADALAH DWITUNGGAL

Seluruh calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 kini sudah mengantongi nomor urutnya masing-masing. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN dari Koalisi Perubahan mendapatkan nomor urut 01.

Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa dirinya dengan Anies Baswedan sangat senang karena mendapatkan nomor urut 01 di Pilpres 2024. Dia menyampaikan, nomor urut 01 sesuai dengan harapannya.

“Saya dan Mas Anies bersyukur dapat nomor 01,” kata Cak Imin saat memberikan sambutannya di Kantor KPU, Selasa, 16 November 2023.

Wakil Ketua DPR RI itu pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memilihnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Dia meminta doa dan restu kepada rakyat Indonesia agar langkahnya bertarung di Pilpres 2024 berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

“Kalau ingin perubahan, ayo kuatkan nomor 01,” kata Cak Imin.

Tidak hanya itu, Cak Imin juga mengajak kepada pendukungnya dan masyarakat luas untuk mengawal proses

Pemilu 2024. Dia mengingatkan para penyelenggara Pemilu untuk tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi memberi dukungan kepada salah satu calon tertentu.

“Tidak boleh ada wasit merangkap pemain. Tidak boleh ada kecurangan,” tegas Cak Imin.

Cak Imin mengilustrasikan Pemilu seperti pertandingan sepak bola, di mana masyarakat akan menikmati dan riang gembira ketika menyaksikan pertandingan sepak bola. “Kita semua yakin kalau kita melihat Pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia,” kata Cak Imin.

Sementara, jika ada pemain atau wasit yang melakukan kecurangan, jangan takut untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Hal itu dilakukan agar pemain dan wasit yang melakukan kecurangan mendapatkan sanksi.

“Kalau ada wasit yang curang kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan tekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru, itulah Pemilu yang saling menjaga,” kata Cak Imin.

Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil, kata Cak Imin, bukan untuk kepentingan masing-masing calon, akan tetapi demi bangsa Indonesia. Dia menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu juga akan berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia.

“Bukan kepentingan AMIN. Tapi, Pemilu yang sehat, yang kuat akan menyelamatkan dan memajukan demokrasi. Kalau

demokrasi maju, pasti rakyat akan semakin makmur,” ujar Cak Imin.

Dia mengajak simpatisan, masyarakat, dan seluruh capres yang bertarung di 2024 mendatang agar menyambut Pilpres dengan riang gembira. Tidak hanya itu, mantan Menteri Ketenagakerjaan itu juga mengajak seluruh paslon untuk mengedepankan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Kami ingin bersama-sama mengisi Pemilu dengan gagasan, ide, cita-cita, dimulai dari track record, rekam jejak, dan berbagai visi-misi yang telah kita miliki masing-masing secara lengkap,” terang Cak Imin.

Dia menyakini pasangan AMIN bisa menang dalam satu putaran. Untuk bisa menang satu putaran, pihaknya harus bekerja keras mengambil simpati dan dukung rakyat Indonesia. Dia pun meminta kepada para pendukungnya turun ke masyarakat untuk menyampaikan program kerja ataupun visi-misi dari pasangan AMIN jika kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

“Pokoknya kita bekerja keras. Pendukung AMIN, ayo kita yakinkan hanya satu jalan untuk Indonesia lebih baik, perubahan nasib, yang miskin jadi cukup, yang kecil jadi besar, yang kuat tetap kuat, yang tidak sehat jadi sehat, yang miskin jadi kaya,” jelas Cak Imin.

Dia pun mengakhiri sambutannya dengan pantut. Dalam isi pantutnya tersebut, dia mengajak masyarakat untuk memilih pasangan AMIN di hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 01,” ujar Cak Imin.

Sementara itu, Anies Baswedan juga mer-

asa senang mendapatkan nomor urut 01 di Pilpres 2024. Dikatakan Anies, dia dan Cak Imin mendapatkan nomor urut 01 karena hikmah yang diberikan kepadanya. “Kami bersyukur. Alhamdulillah. Semua pasti ada hikmahnya. Jadi selalu ada hikmahnya,” ujar Anies.

Dia mengaku merasa gembira ketika mendapat nomor urut 01 saat pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. “Ceria, ada suasana yang khusus, tapi juga suasananya riang gembira,” kata Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, setelah mendapatkan nomor urut pasangan calon, pihaknya langsung bergerak dan turun ke masyarakat. Disampaikan Anies, dirinya dan seluruh simpatisan pasangan AMIN akan menggaungkan nomor urut 01 di masyarakat.

“Langsung kita bergerak dengan angka 01,” kata Anies.

Selain itu, Anies juga memberikan penjelasan terkait dirinya tidak memberikan sambutan saat pengundian nomor urut. Sebab, Anies menyampaikan, pasangan AMIN merupakan dwitunggal. Calon wakil presiden juga memiliki peranan yang setara dengan calon presiden.

“Kita ingin menunjukkan bahwa wakil presiden memiliki kaliber yang setara. Wakil presiden memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk berkomunikasi yang amat baik. Dan, saya bangga berpasangan dengan Gus Imin,” kata Anies.

Atas rasa bangga dan hormatnya kepada Cak Imin, Anies memberikan kesempatan agar cawapres dari Koalisi Perubahan bisa tampil di ruang publik. Sebab, kata dia, cawapres memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu kerja-kerja dari capres.

“Dan rasa bangga itu kami tunjukkan dengan persilakan seluruh rakyat Indonesia menyaksikan cawapres yang bisa menyampaikan gagasannya dengan amat baik, pesannya jelas, penyampaiannya cerita, dan ilustrasinya mudah sekali dipahmi,” ujar Anies.

Anies pun setuju dengan pendapat Cak Imin yang mengilustrasikan Pemilu seperti pertandingan sepak bola. Anies menilai, masyarakat akan menyadari pemain-pemain yang berbuat kecurangan di sebuah pertandingan.

“Semua orang tau apa itu sliding tackle. Dan, semua orang tahu itu nyorakin pemain yang curang. Semua orang tahu wasit yang bersertifikat dengan baik. Pesan-pesan itu mudah ditangkap dan ini sebuah pesan kepada semua bahwa kami pasangan dwitunggal, saling melengkapi, dan bisa saling mengisi,” kata Anies. ●RDO



“Satu dua cempaka biru. Tiga empat dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru. Kawan lama dilupa jangan”



Prabowo Subianto

PRABOWO-GIBRAN MENATAP KEMENANGAN

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan nomor urut 02 untuk Pilpres 2024. Angka tersebut sama dengan Partai Gerindra di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang mendapatkan nomor 2.

Prabowo Subianto merasa terhormat mendapatkan nomor urut 02 di Pilpres 2024. Dia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Saya atas nama pasangan calon nomor urut 02 mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU, dan juga kepada Bawaslu, dan DKPP atas proses pemilihan umum dengan baik,” kata Prabowo saat memberi sambutan.

Prabowo juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap perjalanan demokrasi dari bangsa Indonesia yang tetap teguh hingga saat ini. Dia menyampaikan, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari puluhan ribu pulau, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

“Kita patut bangga, kita adalah negara demokrasi salah satu yang terbesar di dunia. Kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan, siapapun harus bersikap jujur dalam berkompetisi. Dia juga memiliki pendapat yang sama dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa Pemilu harus dijalankan dengan kejujuran dan memberikan keadilan yang sama kepada seluruh pasangan calon.

“Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 01, memang kita bersyukur, kita memiliki negara berdemokrasi,” ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan itu juga merasa bangga Indonesia sebagai negara yang terbesar dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tetap bersatu, meskipun berbeda pilihan ketika datangnya Pemilu. “Alhamdulillah kita masih utuh, masih bersatu, walaupun

banyak tantangan yang kita hadapi,” ujar Prabowo.

Dia juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh pasangan AMIN yang menyampaikan bahwa proses demokrasi ini tidak boleh ada kecurangan. “Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi dan harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 01,” ujar Prabowo.

KPU sebagai panitia penyelenggara Pemilu harus menghadirkan keadilan bagi seluruh pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2024. Dia menilai, kecurangan dalam proses demokrasi akan berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Sebab, sama saja seperti mengkhianati masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Kami yakin KPU akan melaksanakan Pemilu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun, karena kalau pelaksanaan Pemilu curang mengkhianati dan negara Indonesia,” terang Prabowo.

Dia juga merasa bersyukur dan gembira dengan suasana perpolitikan Tanah Air yang semakin cair. Masyarakat pun sudah sangat cerdas dalam menyikapi isu-isu politik yang saat ini mulai memanas. Prabowo mengatakan, Pemilu ataupun Pilpres harus disambut dengan gembira dan penuh senyuman.

“Saya bersyukur dan saya gembira, suasana hari ini suasana penuh kekeluargaan, penuh riang gembira, penuh dengan saling mengasihi. Jadi kawan-kawan, siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negeri ini,” kata Prabowo.

Dia pun menutup sambutannya dengan pantun. Dalam isi pantunnya itu, Prabowo menyinggung soal persahabatan satu sama lainnya.

“Satu dua cempaka biru. Tiga empat dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru. Kawan lama dilupa jangan,” kata Prabowo.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menyebut semua nomor urut yang sudah dikantongi masing-

masing paslon memiliki maknanya tersendiri. Hal itu juga dialami oleh Gibran ketika mendapatkan nomor urut 02.

“Semua nomor punya makna bagus. Tenang saja,” ujar Gibran.

Dia menilai, semua nomor urut yang dimiliki masing-masing paslon juga bagus. Tidak ada yang membedakan satu sama lainnya. Kendati begitu, dia menyebut nomor urut tidak ada yang jelek. Tertantung bagaimana memaknai nomor urut tersebut. “Semua nomor bagus,” kata Gibran.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tidak memiliki firasat apapun soal nomor urut 02 tersebut. Kendati demikian, Gibran menyakini nomor urut 02 akan membawa dirinya kepada kemenangan di Pilpres 2024. “Eenggak ada firasat,” ujar Gibran.

Wali Kota Surakarta itu mengatakan, dirinya akan tetap bekerja keras untuk bisa memenangkan Pilpres. Gibran menegaskan, dirinya tetap optimis dengan nomor urut 02 tersebut bisa memberikannya kemenangan.

Di sisi lain, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju, Perkasa Roeslani, meyakini nomor urut 02 akan memberikan kemenangan bagi pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Dia menambahkan bahwa pasangan yang ia dukung itu bisa menjawab segala tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Selain itu, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju.

“Angka 2 mencerminkan kemenangan dan kesuksesan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang terjadi,” kata Rosan.

Dia memaknai nomor urut 02 sebagai simbol dua jari yang melambangkan victory atau kemenangan. Selain itu, nomor urut 02 juga dapat dimaknai dengan simbol perdamaian atau peace. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pasangan Prabowo-Gibran yang ingin menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia juga meyakini, nomor urut 02 juga akan membawa energi positif bagi bangsa Indonesia. Dia yakin nomor urut 02 akan menghadirkan keharmonisan antar masyarakat.

“Angka dua ini melambangkan harmoni,” ujar Rosan Roeslani.

Tidak hanya itu, dia menyampaikan, pada sila kedua juga disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, nomor urut 02 ini memberikan makna sangat be-

arti bagi pendukung, simpatisan, khususnya pasangan Prabowo-Gibran.

“Sehingga, nomor 02 ini akan membawa Indonesia menjadi negara maju, adil, beradab yang berasaskan kemanusiaan,” pungkasnya. ●RDO





“Saya terima kasih karena pasangan nomor 01 dan pasangan nomor 02 punya komitmen yang sama”

Ganjar Pranowo

GANJAR-MAHFUD WASPADA **DRAKOR POLITIK**

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 03 untuk Pilpres 2024. Nomor tersebut dirasa sangat pas dan cocok dengan pasangan Ganjar-Mahfud.

“Kami mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga, persatuan Indonesia,” kata Ganjar saat memberikan sambutan usai pengundian nomor urut di Kantor KPU, Selasa, 16 November 2023.

Ganjar menyampaikan, seluruh masyarakat Indonesia harus disatukan dalam proses politik yang riang gembira. Sebab, Pemilu ataupun Pilpres merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. “Hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyinggung peristiwa politik yang saat ini terjadi. Menurutnya, peristiwa politik tersebut tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

“Beberapa hari ini, kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik publik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” tegas Ganjar.

Dia menyampaikan, banyak pihak saat ini sedang menyuarakan kegelisahan. Kendati begitu, kegelisahan yang terjadi tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak untuk memperbaikinya.

“Itu kewajiban kita untuk menjaga (demokrasi),” kata Ganjar.

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga proses demokrasi yang saat ini sedang berjalan. Sebab, menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali.

“Harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik, meskipun sekarang belum baik-baik saja,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku tidak merasa beban atas gejolak politik yang terjadi belakangan ini. Dia menyampaikan, dirinya percaya bahwa dukungan dari masyarakat membuatnya menjadi

sosok yang kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Dia menambahkan, demokrasi yang sudah berlangsung sejak reformasi harus tetap dipertahankan.

“Kita harus sampaikan, saya tenang kok dan kami ini tenang semuanya, karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini,” kata Ganjar.

Sebagai warga negara, lanjut Ganjar, dirinya sangat mendukung dan mendorong semua pihak untuk menjaga demokrasi yang sudah tertanam sejak dulu. Disamping itu, Ganjar sangat menghargai perjuangan para pendahulu dalam menghadirkan demokrasi di Indonesia. “Saya hormati perjalanan demokrasi ini,” ujar Ganjar.

Dia menilai, demokrasi yang sudah diperjuangkan selama ini sudah sangat baik. Namun, terkandung terdapat pihak-pihak yang berupaya untuk merusak demokrasi. Dia menalogikan demokrasi seperti air yang mengalir, di mana demokrasi akan terbentuk dengan sendirinya.

“Memang kadang-kadang lurus, ka-

dang-kadang berliku seperti aliran air, tapi percayalah air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batin, dia tidak akan bisa dibentuk apapun. Kalau bentuknya itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba muara. Itulah para demokrasi yang hari ini kita hidupkan. Dan, tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama,” jelas Ganjar.

Dia mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar ada reformasi yang sudah diperjuangkan ini terus dilanjutkan. Selain itu, Ganjar juga mengajak agar perjalanan demokrasi tetap pada jalur yang tepat.

“Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jujur situasi yang bisa berjalan pada rel,” tegas Ganjar.

Ganjar juga mengajak Masyarakat untuk mengawal perjuangan reformasi dalam membangun bangsa Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Dia menekankan bahwa proses demokrasi ini harus terhindar dari intervensi ataupun kecurangan.

Dia menambahkan, agenda reformasi, termasuk di dalamnya demokrasi, harus terbebas dari unsur-unsur Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sebab, atas perjuangan reformasi ini sudah terbentuk yang namanya konsitusi. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali, harus mematuhi konstitusi.

“Kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh-jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang,” kata Ganjar.

Dia mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia memiliki tugas untuk menjaga konstitusi. Hal itu di-

lakukan demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.

“Kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, kelompok masyarakat dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI,” terang Ganjar.

Bahkan, Ganjar mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga NKRI. Selain itu, tidak perlu takut untuk melaporkan segala upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang berupaya merusak persatuan bangsa. “Laporkan praktik-praktik tidak baik yang akan mencederai demokrasi,” kata Ganjar.

Dia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memiliki komitmen yang sama terhadap NKRI.

“Saya terima kasih karena pasangan nomor 01 dan pasangan nomor 02 punya komitmen yang sama,” kata Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar mengajak kepada seluruh paslon untuk bertarung secara jujur dan adil. Dia juga mengingatkan agar menjaga integritas. Jangan sampai demi keinginan pribadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.

“Kami sangat senang, mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran batin dan perkataan kita,” tambah Ganjar.

Sementara, Mahfud MD menutup pidato pasangan tersebut dengan sebuah pantun. Ada dua pantun yang disampaikan oleh Mahfud MD.

“Hukum yang tegak harap kita. Sejahtera merata di depan bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gontong royong pilih nomor tiga,” kata Mahfud.

“Satu lagi. Membakar seafood dari Palu. Ke negeri Cina naik pesawat. Kalau Ganjar Mahfud menang Pemilu. Dukungan ke Palestina makin menguat,” tutup Mahfud. ●RDO



“Demokrasi harus berjalan melalui kontestasi pemilu ini. Ya itu tadi jujur, adil, terpuji dan saya menambahkan terpercaya lagi. Jadi terpuji dan terpercaya agar hasilnya legitimate”

Masinton Pasaribu



JANGAN TERJADI LAGI PERISTIWA 1998

Para legislator di DPR RI berharap tak ada pihak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam rangkaian Pemilu 2024. Mereka juga berharap peran aktif Masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan.

“K emarin Komisi I sudah buat Panja netralitas TNI, tapi saya yakin aparat akan menggunakan akal sehat. Kita tidak menuduh selama ini, cuma berharap agar kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat dan juga dibiayai oleh rakyat, tidak disalahgunakan ketika pesta rakyat,” kata anggota DPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid usai diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye dengan Damai’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023.

Gus Jazil lantas mengutip pernyataan Anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, yang menyampaikan bahwa pemilu harus ‘Luber dan Jurdil’ serta terpuji. Adapun asas pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil telah termaktub dalam Pasal 2 UU Pemilu.

“Memang pemilu LUBER dan JURDIL itu tema dari dulu, saya pikir di samping itu kita perlu JURDIL dan LUBER dan terpuji. Jujur adil dan terpuji karena ternyata ketika saya lihat fakta proses ada hal-hal yang tidak terpuji seperti yang juga disampaikan Pak Masinton,” tuturnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini pun menegaskan, hal-hal yang dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara harus dihindari. Menurutnya, ada ongkos yang harus dibayar mahal apabila masyarakat tak lagi percaya pada institusi demokrasi.

“Proses-proses yang tidak terpuji dihindari, apalagi dapat mengakibatkan ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga, tidak percaya kepada MK, tidak percaya kepada KPK, tidak percaya sama presiden, tidak percaya sama DPR, itu nanti munculnya anarkis. Maka dari itu, kita hindari perbuatan yang tercela yang mengakibatkan orang tidak lagi percaya pada institusi demokrasi. Itu mahal itu ongkosnya kalau gitu,” tegasnya.

Gus Jazil kembali mengingatkan apabila ada penyalahgunaan kewenangan dalam Pemilu 2024, maka akan menjadi preseden yang buruk yang dapat berdampak pada pemilu selanjutnya.

Senada dengan Gus Jazil, Masinton Pasaribu juga mengharapkan agar Pemilu 2024 berjalan secara demokratis tanpa ada kecurangan dari pihak manapun. Masinton juga menyatakan, Pemilu harus dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil.

“Demokrasi harus berjalan melalui kontestasi pemilu ini. Ya itu tadi jujur, adil, terpuji dan saya menambahkan terpercaya lagi. Jadi terpuji dan terpercaya agar hasilnya legitimate,” ujar Masinton.

Politisi Fraksi PDIP ini menyampaikan bahwa pemilihan umum harus berlangsung secara demokratis dan tidak sekadar ajang mencari pemenang. Tetapi proses suara rakyat itu harus dihormati.

“Demokrasinya harus dijalankan, bukan sekadar jadwal 5 tahunan. Jadi kami ini kompak untuk berjuang agar pemilu ini mengembalikan semangat reformasi. Intinya kan kita pengen kontestasi ini berjalan secara demokratis, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh menggunakan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan calon tertentu, dan tentu kami akan menjaga bersama-sama proses demokrasi ini,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR ini juga menekankan tidak ingin terjadi lagi hal seperti Pemilu 1998. Ia lantas menyinggung permasalahan yang terjadi pada Pemilu 1997 yang disinyalir menjadi pemicu pergerakan di masa itu.

“Soeharto (pada) 1997 melaksanakan pemilu dan menang 70 persen, tapi rakyat tidak percaya dengan hasil proses pemilu yang curang tersebut. (Tahun) 1998 rakyat bergerak, mahasiswa bergerak, dan kita dudukkan Gedung DPR di sini. Sejarah kecurangan, kejahatan demokrasi yang menyelenggarakan pemilu secara manipulatif dan hasil yang manipulatif dan penuh kecurangan, tidak diterima oleh rakyat dan tidak legitimate di hadapan rakyat, maka jangan diulang lagi,” tegasnya.

Partisipasi Publik

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, meminta masyarakat berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024. Keterlibatan masyarakat ini bisa dari memberikan hak suaranya, maupun dalam mengawasi jalannya pemilu.

“Kepada bapak/ibu masyarakat seluruhnya di Indonesia ya. Mari kita

sama-sama sukseskan Pemilu ini, suksesnya Pemilu salah satu indikatornya adalah dengan bapak/ibu yang punya hak pilih harus terlibat (menggunakan hak pilihnya). Masyarakat juga harus kita sadarkan bahwa mereka juga harus punya peran untuk bisa mengawasi semua proses pemilu dengan baik,” ungkap Doli usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis, 16 November 2023.

Doli berharap masyarakat tidak golput dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah, anggota legislatif, dan calon presiden yang memang mewakili kepentingan rakyat. Karena dengan menyalurkan hak suaranya itulah, rakyat yang akan menentukan arah kebijakan negara di masa yang akan datang.

“Pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih produktif, yang lebih membangun. Pemilu ini yang menentukan masa depan nasib kita. Jadi mari kita tentukan masa depan dengan aktivitas secara bersama-sama. Jangan biarkan masa depan nasib kita ditentukan orang-orang lain harus ditentukan oleh kita semua,” kata politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain hak memilih, Doli menjelaskan, dalam menyukseskan pemilu, peran pengawasan oleh masyarakat juga tidak kalah

penting. Mengingat peran pengawasan pemilu hanya dilakukan oleh Bawaslu yang memiliki keterbatasan, baik secara keanggotaan maupun anggaran. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

“Kalau kita mau menghindari kecurangan satu memang betul itu tanggung jawabnya Bawaslu yang kedua juga adalah tanggung jawab masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR, Ibnu Mahmud Bilalludin, menjelaskan, Pemilu akan banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan teknis di lapangan. Setiap detail dari tahapan pemilu harus dicermati oleh para penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Pemilu merupakan hal teknis, yang detail-detailnya harus kita cermati bersama, mulai dari yang umum, tahap demi tahap sudah kita lalui. Sampai dengan kertas suara dicoblos, dihitung, dan terakhir dalam bentuk SK oleh KPU,” ungkap Ibnu, Rabu, 15 November 2023.

Dia pun menyampaikan permasalahan kurangnya surat suara selalu menjadi persoalan yang berulang, bahkan terjadi di berbagai daerah. “Nah, dari kunjungan beberapa kali, salah satunya di Kota Pekanbaru ini, ada beberapa hal yang persoalannya hampir sama. Tadi kami sampaikan juga mengenai kurangnya surat suara di beberapa TPS, itu juga pernah kami temukan di Jogja,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.

Dia menegaskan agar permasalahan tersebut menjadi perhatian bersama dan mewanti-wanti agar tidak terulang kembali. Menurutnya, setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih harus mendapatkan fasilitas untuk memilih. KPU berkewajiban memenuhi hak tersebut.

“Ini memang akibat dari salah satu kewajiban KPU agar setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih, bagaimanapun caranya harus bisa difasilitasi memilih,” terang Ibnu.

Dia pun mencontohkan salah satu persoalan yang kerap kali terjadi di lapangan, yakni para perantau yang memiliki KTP tidak sesuai domisili karena alasan tugas kerja atau pun belajar, sehingga terkendala hak pilihnya.

“Antara kewajiban dan ketersediaan surat tidak bisa bersamaan, sehingga ada beberapa lokasi TPS terjadi kekurangan surat suara, ini terjadi di beberapa tempat. Karena tidak bisa pulang, sehingga memilih di kota tempat mereka bekerja. Saya kira ini harus menjadi perhatian oleh KPU,” ungkap Ibnu.

•RDO





“Pemilu juga harus memberikan pendidikan politik yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi pemilih pemula yang berusia di bawah 18 tahun, serta anak disabilitas pemilih pemula agar menggunakan hak pilih dengan baik dan benar”

Diah Puspitarini

INFO

EKSEKUTIF

7

Minggu III • November 2023

PEMILU 2024 HARUS RAMAH ANAK

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta partai politik dan peserta Pemilu 2024 untuk memperhatikan regulasi perlindungan anak. Selain itu, juga memastikan hak anak untuk menyampaikan partisipasinya dapat dilaksanakan sesuai tingkat usianya agar tercipta pemilu yang ramah anak.

“**B**oleh melibatkan anak usia 17 tahun sesuai dengan hak pilihnya. Tapi, hindari melakukan pelanggaran hak anak yang akan memposisikan anak sebagai pihak yang dapat menjadi korban,” kata Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar, di Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Dalam peringatan Hari Anak Sedunia, pihaknya menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 yang ramah anak.

Tujuan SEB ini untuk melindungi dan memenuhi hak anak dengan tidak mengeksploitasi anak, serta memberikan pendidikan politik dan keterbukaan akses informasi bagi pemilih pemula di bawah 18 tahun.

Menurut Nahar, ada 11 poin terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

“Kita berharap dalam pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilu maupun setelah pemilu bisa betul-betul memperhatikan kebutuhan anak,” katanya.

Dia mencontohkan anak yang belum memiliki hak pilih supaya jangan dilibatkan dalam Pemilu. Sementara untuk anak yang sudah berusia 17 tahun, jangan sampai dieksploitasi dan dilanggar haknya.

“Kita harus bisa memperhatikan pemenuhan hak anak agar mereka bisa tetap belajar, tidak didiskriminasi dalam pelaksanaan, terhindar dari praktik-praktik yang membuat anak-anak itu tidak menikmati proses pembelajaran dari pelaksanaan Pemilu,” katanya.

Kemudian, jangan melibatkan anak dalam praktik politik uang. “Orang dewasa enggak melakukan politik uang, tapi menyuruh anak. Itu enggak boleh,” kata Nahar.

Selain itu, tidak boleh menggunakan tempat belajar dan tempat bermain anak untuk kepentingan kampanye. “Kalau di perguruan tinggi sudah ada aturan yang membolehkan. Untuk SMA ke bawah, se-

baiknya tidak untuk kepentingan politik,” ujarnya.

Pihaknya berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang ramah anak dan bisa memberikan pencerahan dan pembelajaran bagi banyak orang, termasuk anak.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, juga mengajak semua pihak agar menjadikan peringatan Hari Anak Sedunia 2023 sebagai momentum upaya perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang ramah anak pada 2024.

“Hari Anak Sedunia kita jadikan momentum negara hadir dalam hal perlindungan anak dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Menteri Bintang.

Bintang menuturkan, Hari Anak Sedunia diperingati dengan memberikan ruang bagi anak-anak untuk berekspresi dalam pemanfaatan waktu luangnya serta berkreasi melalui berbagai wahana belajar yang menyenangkan.

Peringatan Hari Anak Sedunia kali ini bersamaan dengan kemeriahan politik jelang pesta demokrasi 2024. Untuk itu, pihaknya menandatangani SEB antara Kementerian PPPA, Kemendagri, Bawaslu, KPU, dan KPAI mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 yang ramah anak.

Tujuan SEB ini untuk melindungi dan memenuhi hak anak dengan tidak mengeksploitasi anak, serta memberikan pendidikan politik, dan keterbukaan akses informasi bagi pemilih pemula di bawah 18 tahun.

“Ini adalah bentuk negara hadir untuk melindungi

kalian, anak-anak Indonesia dengan menciptakan demokrasi, Pemilu yang ramah anak,” katanya.

Dia menambahkan pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa dilakukan salah satu pihak saja. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak terkait harus terus dibangun dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

“Pemenuhan hak anak harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, termasuk media. Wujud sinergi dan kolaborasi lintas sektoral itu kita wujudkan hari ini, bersama-sama seluruh stakeholder merayakan Hari Anak Sedunia,” katanya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024 untuk menghadirkan pemilu yang ramah anak dan tidak melakukan eksploitasi terhadap mereka, terutama saat berkampanye.

“Agar pemilu menjadi ramah anak, di mana anak tidak dieksploitasi dalam kampanye,” kata Komisioner KPAI, Diah Puspitarini.

Berdasarkan Pasal 16 UU 10/2016 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 280 UU 7/2017 tentang Pemilu, secara tegas melarang melibatkan anak-anak dan melibatkan orang yang tidak memiliki hak pilih.

Berdasarkan aturan tersebut, menurut dia, penting bagi semua pihak untuk memperhatikan perspektif anak dan kepentingan terbaik bagi anak saat pemilu.

Hal lain yang harus diperhatikan, kata dia, pendidikan politik yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi pemilih pemula.

“Pemilu juga harus mem-

berikan pendidikan politik yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi pemilih pemula yang berusia di bawah 18 tahun, serta anak disabilitas pemilih pemula agar menggunakan hak pilih dengan baik dan benar,” ujarnya

Dia mengimbau para kontestan mengedepankan pesta demokrasi yang santun dan berkeadaban dengan menghindari kekerasan verbal dan nonverbal.

Sebelumnya, Anggota KPAI, Sylvana Maria Apituley, mengapresiasi terbitnya PKPU 20/2023 tentang Perubahan atas PKPU 15/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum untuk memastikan optimalisasi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dalam Pemilu 2024.

“Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye yang berperspektif hak anak ini mencerminkan komitmen penyelenggara Pemilu dan pemerintah dalam memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak,” kata Sylvana.

KPAI mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan lembaga/komunitas pengawas pemilu agar ikut menyebarkan dan memanfaatkan secara optimal PKPU 20/2023 tentang Kampanye Pemilu.

Pihaknya juga meminta komitmen ini diterjemahkan melalui regulasi tentang penyelenggaraan pemilu yang mengatur rambu-rambu perlindungan anak dengan cara mensterilkan sekolah dari kampanye politik.

“KPAI juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran,” katanya.

Sylvana mencontohkan beberapa pelanggaran dimaksud, di antaranya pelibatan anak oleh orang tua/keluarga dalam mobilisasi massa pendukung, penyalahgunaan foto atau gambar anak pada poster dan atau baliho calon peserta pemilu, penyalahgunaan tempat bermain, tempat penitipan anak, dan atau tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye, mobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah.

Selain itu, juga penyalahgunaan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih capres, partai atau caleg tertentu, memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara, manipulasi data anak belum berusia 17 tahun, serta memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon presiden/ kepala daerah/caleg/parpol tertentu.

Sylvana mendorong semua pihak untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak selama Pemilu 2024.

“KPAI mengajak semua pihak, khususnya peserta Pemilu dan masyarakat partisipan aktif kampanye Pemilu untuk ikut melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak, serta terus memprioritaskan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak selama Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024,” katanya. ●RDO



“Kalau badan pengawasnya itu tidak berani mengambil langkah, ya tentu ini saya kira tidak efektif itu pengawasannya”



Ma'ruf Amin

BAWASLU HARUS BERANI TINDAK PELANGGARAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan baik dan memproses setiap aduan pemilu yang masuk. Tak hanya di pusat, Bawaslu di daerah juga perlu meningkatkan kinerja pengawasannya.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, mengemukakan jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh sembarang menyatakan suatu hal atau laporan adalah temuan. Pasalnya, dia menyatakan temuan harus dapat dibuktikan.

Maka penting menurutnya jajaran pengawas lebih pintar dari orang yang diawasi dan memahami regulasi. Sehingga, dia meminta seluruh jajaran dapat memahami mekanisme penanganan pelanggaran sesuai aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Temuan itu pengawasan aktif yang harus bisa dibuktikan, 90 persen. Jangan coba-coba sesuatu diklaim temuan tapi ternyata berhenti karena tidak cukup bisa dibuktikan,” kata Puadi di Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Walau begitu, Puadi menjelaskan Bawaslu harus tetap merangkul complain masyarakat ketika mereka melakukan upaya hukum. Maka, dia pun menyatakan divisi penanganan pelanggaran tidak boleh sembarangan, melainkan dapat menyampaikan data dengan valid agar tidak menimbulkan hoaks.

“Kalau data enggak valid jangan sekali-kali

ekspos kerjakan secara profesional supaya kerja kita enggak main-main. Kalau kita tidak ngerti belajar pahami, telusuri dengan benar,” ucapnya.

Terlebih, Puadi melihat tahapan kampanye tinggal hitungan hari, sehingga potensi pelanggaran dapat berubah menjadi temuan. Hal inilah yang dia lihat perlu diawasi secara benar untuk menentukan hal mana yang melanggar dan menjadi temuan atau bukan.

“Pahami kasusnya, cara menangani, menelusuri pokok masalahnya. Mesti memahami kalau tidak susah mengungkap kasus-kasus yang ada,” tegas Puadi.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mendorong Bawaslu seluruh Indonesia lebih memasifkan kerja pencegahan. Pasalnya, hingga saat ini Bawaslu telah mengidentifikasi sebanyak 1.952 kerawanan.

Dari identifikasi tersebut, Lolly mengatakan telah dilakukan pencegahan, baik berupa nota dinas, surat imbauan, perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, dan lain sebagainya.

“Jumlah tersebut, masih sedikit, karena kalau dilihat dari tahapan, sesungguhnya harus bisa melakukan pencegahan lebih masif lagi. Sulawesi Tengah, Lampung, Bali, NTB,

Jawa Timur ini adalah lima provinsi paling banyak melakukan pencegahan,” katanya saat membuka Rapat Kerja Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Bogor, Sabtu, 18 November

2023.

Lolly mengingatkan masa kampanye yang merupakan masa yang seluruh dimensinya rawan tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP). Pertama, dimensi konteks sosial politik. Kedua, dimensi penyelenggaraan pemilu.

“Untuk semua jajaran Bawaslu, baik dari sisi kelembagaan maupun perseorangan harus mengencangkan cara kerjanya,” tegas perempuan asal Jawa Barat itu.

Dimensi ketiga yaitu kontekstasi. Dia mengingatkan kacamata yang harus digunakan Bawaslu yaitu rawan tinggi, potensi bahaya dan benturannya sangat tinggi. “Yang harus dilakukan Bawaslu, tegak lurus terhadap peraturan, tegak lurus terhadap regulasi, cara pandang kita melihat seluruh pasangan calon taat pada regulasi,” tegasnya

Kelima, yang juga dimensi rawan tinggi yakni partisipasi. “Maka lakukan pencegahan sebanayak-banyaknya, jika melihat potensi kegaduhan keluarkan surat pencegahan,” titahnya.

Selain itu, saat membuka Festival Budaya yang diadakan Bawaslu Kabupaten Siak, Riau, Lolly berharap tidak saja melestarikan gerakan budaya, tetapi juga menciptakan gerakan efek deterens (menolak, menangkis, atau mencegah) terjadinya kecurangan pemilu.

Mengenai caranya untuk mencegah kecurangan, Lolly menjelaskan, bisa bermacam-macam. Dia memberikan contoh, melalui pendidikan politik (voter education), melalui infografis,

mime, atau video edukasi di media sosial, pendidikan secara mandiri atau bersama Bawaslu, KPU, Kesbangpol, dan lainnya.

“Bisa juga dengan menyebarkan konten edukasi di akun Bawaslu, Bawaslu Provinsi Riau, maupun Bawaslu Kabupaten Siak. Dan juga melalui pemantauan (election monitoring),” terangnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu tersebut memberikan beberapa strategi pengawasan saat membuka Rapat Evaluasi Pengawasan Pengadaan Logistik Tahap I Pemilu 2024 se-Provinsi Riau. Setidaknya ada dua pesan yang disampaikan Lolly saat itu.

Pertama, melakukan pengawasan melekat atas pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Kedua, melakukan saran perbaikan apabila dalam pengawasan terdapat kesalahan administrasi.

“Tentunya pengawasan tersebut harus dengan membawa alat kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan,” terangnya.

Di sisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Bawaslu menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan baik dan memproses setiap aduan pemilu yang masuk. Hal itu sebagaimana disampaikan Ma'ruf soal adanya kabar penjabat kepala daerah dan kepala desa yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan aturan sudah jelas bahwa TNI/Polri dan aparat sipil negara (ASN) harus netral. Presiden Joko Widodo, kata Ma'ruf, sudah memerintahkan para penjabat kepala daerah untuk netral.

“Jadi saya kira dari tata aturan dan sebagainya itu sudah (jelas),” kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Oleh karena itu, Wapres meminta Bawaslu selaku pengawas di lapangan untuk melakukan pengawasan pemilu dengan ketat.

“Nah di lapangan ini saya kira yang perlu itu pengawasannya dari Bawaslu ya, untuk terus melakukan pengawasan yang ketat dan menerima aduan-aduan laporan yang disampaikan untuk diproses,” ujarnya.

Ma'ruf mengajak masyarakat untuk ikut menjadi pengawas dan melaporkan manakala menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

“Kalau badan pengawasnya itu tidak berani mengambil langkah, ya tentu ini saya kira tidak efektif itu pengawasannya,” jelasnya. ●RDO





“KPU merupakan pilar demokrasi dan pemain kunci bagi terselenggaranya Pemilu 2024 yang sukses dan demokratis”

Suhartoyo

INFO
KPU

9

Minggu III • November 2023

ANTISIPASI DINI SENGKETA HASIL PEMILU

Belum mulai masa kampanye, isu dugaan kecurangan dalam pemilihan umum sudah mengemuka. Sejumlah pengamat khawatir keaduan ini dapat memicu ketegangan yang berujung konflik di tengah masyarakat ketika ada sengketa pemilu pada akhir Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyiapkan diri menghadapi potensi sengketa hasil Pemilu 2024 dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV di Jakarta, 14-17 November 2023.

Kegiatan hasil kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) ini diikuti oleh 364 peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten/kota di Indonesia.

Anggota KPU, Mochammad Afifuddin, menerangkan, tujuan dari bimtek adalah untuk memberikan bekal kepada jajaran KPU akan potensi munculnya sengketa hasil pemilu. Apalagi sengketa selalu terbuka, mengingat persaingan yang ketat akan terjadi untuk memperbutkan kursi yang tersedia.

“Yang harus kita pahami adalah namanya kompetisi ada konflik, dan konflik ini sah, tinggal mekanisme bagaimana jalan keluar, sengketa proses sengketa hasil. Jadi residu konflik pasti tercipta dalam setiap perlombaan,” kata Afif, Kamis, 16 November 2023.

Afif menekankan agar Divisi Hukum KPU memiliki strategi dalam menghadapi potensi sengketa hukum, baik proses maupun hasil. Dia juga mengingatkan bahwa kualitas-kualitas proses di tahapan pemilu sangat berdampak pada kualitas hasil.

“J a d i s e n g -

ketaka hasil kadang juga dipicu dengan situasi-situasi kualitas tahapan atau proses. Kita lihat beberapa kasus pilkada juga begitu,” lanjut Afif.

Afif juga menyampaikan beberapa tahapan pemilu yang rentan disengketakan oleh peserta pemilu maupun calon. Yang terbaru, pascaputusan Daftar Calon Tetap (DCT), meski jumlahnya tidak banyak yakni 35 sengketa.

“Kalau ibarat satu baskom sengketa tidak sampai segini, sedikit, kalau (ibarat) makanan satu sendok, tidak terasa, sedikit sekali,” ungkap Afif menggambarkan.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, mengatakan perkembangan demokrasi dan pemilu merupakan suatu proses yang harus dimaknai secara positif, meskipun dalam perkembangan tersebut juga telah melahirkan kompleksitas permasalahan sistem yang tinggi. Permasalahan itu tidak hanya dalam proses pelaksanaan pemilunya, melainkan juga terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu pasca-rekapitulasi suara dilakukan.

“Bahwa KPU merupakan pilar demokrasi dan pemain kunci bagi terselenggaranya Pemilu 2024 yang sukses dan demokratis. Untuk itulah, mengapa bimtek ini digelar oleh MK dengan harapan agar terbangun sinergitas kerja antarpengelola negara dengan institusi demokrasi, dalam rangka membangun negara demokratis yang berdasarkan atas hukum,” tegas Suhartoyo.

Suhartoyo mengimbau kepada seluruh jajaran KPU agar menjaga integritas dalam proses demokrasi untuk mencapai hasil pemilu yang diharapkan. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama dan sinergitas seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan pemilu demi terjaganya kedaulatan rakyat.

“Dalam persoalan yang terjadi sebelum penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu, kita dapat bersinergi. Tapi apabila sudah masuk penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu yang masuk di MK, sudah tidak bisa (bersinergi). Yang bisa adalah bagaimana hukum acara kita patuhi dan hukum acara sebagai alat untuk pembuktian dari Pemohon,” jelas Suhartoyo.

Selain itu, Suhartoyo juga menjelaskan, konstitusi telah mengamanatkan pelaksanaan pemilu harus didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika prinsip dalam pemilu dijadikan pegangan dan dilaksanakan dengan baik, maka proses pemilu akan terselenggara dengan baik, dan hasilnya pun dapat melahirkan suksesi kepemimpinan yang baik pula.

Suhartoyo mengatakan, bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 2024 ini, bertujuan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pemilu, yang menjadi hajat nasional. Sebagaimana diketahui bersama, sengketa hasil pemilu merupakan babak akhir dari tahapan proses pemilu yang akan diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari 2024 yang akan datang.

2024 yang akan datang.

Kepala Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) MK, Nanang Subekti, mewakili Sekretaris Jenderal MK dalam sambutannya menjelaskan kurikulum materi bimtek PPHU. “Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK telah menyusun kurikulum dan pembagian tiap kluster yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran,” ujar Nanang.

Bimtek KPU angkatan IV akan mempelajari kurikulum Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Potensi Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Teknik Penyusunan Jawaban Termohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024, Sistem Informasi Penanganan Perkara elektronik dan Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang nantinya akan dibagi tiap kluster.

Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU, Andi Krisna, mengatakan ada tiga aktor penting dalam pemilu, yakni peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemilih. Mekanisme penyelesaian konflik antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, antara penyelenggara dengan penyelenggara, dan antar peserta, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diselesaikan secara berkeadilan.

Andi menjelaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, serta memantau semua tahapan pemilu. KPU juga wajib melaksanakan semua tahapan pemilu secara tepat waktu.

Mekanisme penyelesaian PPHU telah diatur dalam UU Pemilu. Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan ke MK.

Atas dasar itu, KPU telah melaksanakan bimtek bekerja sama dengan MK. Konteks bimtek ini, menurut Andi, agar para peserta dapat mengantisipasi sedini mungkin jika ada permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke MK. RDO



“Masyarakat NTT akan menderita, rugi besar kalau tidak mendukung dan memilih Frans Aba sebagai Gubernur”



Thomas Ola Langoday

TOKOH MUDA KOMITMEN BANGUN NTT

Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2024 akan diwarnai oleh sejumlah tokoh terbaik.

Beberapa tokoh telah menyatakan kesiapan mereka untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur NTT yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Salah satu tokoh yang telah menyatakan kesiapannya dan dianggap layak untuk maju sebagai Calon Gubernur NTT adalah Fransiskus Xaverius Lara Aba, yang lebih dikenal sebagai Frans Aba.

Berprestasi dalam dunia pendidikan, Frans Aba berhasil meraih gelar Philosophi of Doctoral dari University Sains Malaysia. Selain mengejar pendidikan, Frans Aba juga membangun karirnya sebagai seorang dosen dan akademisi.

Ia terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan menjadi konsultan bagi beberapa perusahaan multinasional, tidak hanya di Jakarta, Malaysia, dan Singapura, tetapi juga di Amerika dan Afrika.

Dengan pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya, Frans Aba, yang masih muda, berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam membangun NTT dan menyatakan diri siap maju sebagai Calon Gubernur NTT dalam Pilgub 2024.

Visi pembangunan Frans Aba jika terpilih sebagai Gubernur NTT adalah

meningkatkan ekonomi rakyat secara adil dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh NTT.

Sejumlah tokoh di NTT terang-terangan mengakui kapasitas dan integritas Frans Aba, seperti diungkapkan mantan Wakil Bupati Lembata, Dr Thomas Ola Langoday.

Langoday menyatakan, Frans Aba merupakan pribadi yang luar biasa dan luar biasa sejak masa mahasiswanya. Ia menggambarkannya sebagai seorang pemimpin muda yang visioner dengan komitmen yang teguh.

“Sebagai mantan dosennya, saya ingin menyampaikan bahwa Frans Aba adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah seorang visioner muda yang memiliki komitmen kuat.”

Apa

yang direncanakan harus dijalankan dengan baik. Masyarakat NTT akan menderita, rugi besar kalau tidak mendukung dan memilih Frans Aba sebagai Gubernur NTT. Frans bukan orang biasa, dibelakangnya ada orang-orang hebat,” tegas Langoday.

Mempertegas kesaksian tersebut, mantan Wakil Kota Kupang Herman Man menegaskan sudah saatnya NTT dipimpin Frans Aba.

“Kehadiran Frans Aba sebagai calon gubernur kita tidak perlu diragukan lagi. Frans adalah Doktor Ekonomi Daerah. Di bawah kepemimpinan beliau, kita akan membangun perekonomian NTT secara menyeluruh, tanpa mengabaikan satu daerah pun. Flores akan kita jaga, menata Sumba, memajukan Timor, mendukung Lembata, merawat Alor, dan menjaga Rote dan Sabu. Semuanya akan kami tangani,” kata Herman Man.

Frans Tulung, Advokat Senior dan Politisi Kupang, menyambut baik dan menyambut positif prospek Frans Aba menjadi Gubernur NTT 2024-2029.

“Frans Aba mempunyai kapasitas. Beliau mempunyai basis kompetensi di bidang perekonomian yang sangat dibutuhkan masyarakat NTT. Beliau mampu merancang dan membangun kembali perekonomian masyarakat, menjamin kesejahteraan terpadu di NTT,” kata Frans Tulung.

Tokoh asal Manggarai Kupang ini mengingatkan, jika Frans Aba menjadi Gubernur NTT, maka ia harus tetap dinamis dalam memimpin, komunikatif, dan rendah hati, karena sifat-sifat tersebut merupakan dambaan masyarakat NTT.

“Beliau akan membuktikan bahwa kepemimpinan yang sejati bukanlah soal gelar, status, atau kekuasaan, tetapi tentang harkat dan martabat masyarakat. Saudara punya kapasitas untuk itu,” ungkap

Frans Tulung.

Sementara itu, Frans Aba mantap berkomitmen menjadi gubernur demi kepentingan masyarakat NTT.

“Saya serius dan siap menjadi Gubernur NTT 2024-2029. Dengan semangat gotong royong, kita bekerja sama, serahkan pada rakyat dan Tuhan yang menentukan,” kata Frans Aba.

Segala dukungan dan respon positif yang mengalir kepada Frans semakin memantapkan komitmennya menjadi gubernur untuk masyarakat NTT.

“Saya berkomitmen untuk mencalonkan diri di Pilgub NTT 2024,” sambungnya.

Dijelaskannya, tujuan untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat NTT, mendesain ulang dan membangun kembali NTT yang lebih maju dengan semangat gotong royong. terus hadir untuk masyarakat NTT, dimanapun, kapanpun.

“Saya akan tetap hadir dan berbuat baik, meski di tempat yang tidak disangka kehadiran saya,” ungkap Frans dengan penuh semangat.

Diketahui Frans Aba telah terjun ke dunia politik selama lebih dari dua dekade, menawarkan segudang pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang dinamika politik di negaranya.

Dengan latar belakang tersebut, ia menunjukkan kemampuan memahami kebutuhan holistik masyarakat dan membaca perubahan sosial yang terjadi di dalamnya.

Terkait aset strategis, Frans Aba memandang pengetahuan politik merupakan aset krusial dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam politik, setiap kebijakan harus selaras dengan kondisi politik dan sosial yang ada.

Dengan pemahaman mendalam tentang proses politik, Frans Aba dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam melaksanakan inisiatif pembangunan.

Lebih lanjut, Frans Aba sangat menjunjung tinggi prinsip inklusivitas. Ia menyadari bahwa pembangunan inklusif harus mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk kelompok rentan dan marginal.

“Melalui kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, saya memastikan kebijakan pembangunannya menjangkau dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Selain inklusivitas, dirinya juga mengedepankan inovasi sebagai fokus utama dalam kebijakan pembangunan. Ia mengakui tantangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat memerlukan solusi yang inovatif.

Dalam perancangan kebijakan, Frans Aba secara konsisten mencari pendekatan baru dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. ● IRY





“Dalam konteks Jateng, potensi lima partai dalam pemilihan gubernur dengan PDIP menonjol karena dukungan pemilihnya yang signifikan, menyumbang 21 persen suara pada Pilpres 2019”

Nur Hidayat Sardini

PARTAI POLITIK JADI PEMEGANG TIKET PENCALONAN GUBERNUR JATENG

Setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden, kemungkinan besar akan mempengaruhi dinamika politik dalam pemilihan calon Gubernur (cagub) Jawa Tengah pada Pilgub Jateng 2024.

Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, telah menjadi salah satu calon gubernur terkuat berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga Parameter Politik Indonesia pada bulan Juni 2023.

Survei tersebut mencakup 35 kabupaten/kota di Jawa dan melibatkan 800 responden dengan usia minimal 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP.

Wawancara tatap muka dilakukan dengan metode multistage random sampling, dengan proporsi antara pria dan wanita mendekati 50:50.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 3,5 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam skenario elektabilitas tertutup dengan 11 tokoh, Gibran mendominasi dengan 45 persen.

“Diikuti oleh Taj Yasin (5,8 persen), Hendrar Prihadi (3,6 persen), Dico Ganindito (3,3 persen), dan Yusuf Chudori (2,9 persen),” jelasnya.

Adi Prayitno juga mencatat bahwa elektabilitas di bawah 2 persen mencakup beberapa nama seperti Achmad Husein, Joko Suranto, Sudirman Said, Rustriingsih, FX Hadi Rudyatmo, dan Condro Kirono.

Meskipun demikian, sekitar 33,9 persen responden menyatakan ragu atau tidak memberikan jawaban, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pemanasan politik di Jawa Tengah dan ketiadaan petahana.

Sementara, Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Nur Hidayat Sardini, menilai Pilgub Jateng 2024 mendatang akan sangat bergantung pada hasil pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

Ia menekankan keterkaitan ketiga pemilu tersebut dan menyatakan bahwa dinamika proses politik tersebut saling terkait.

Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawa-

slu) periode 2008 hingga 2011 ini menuturkan, keberhasilan dan hasil pemilu presiden dan legislatif akan berpengaruh signifikan terhadap pemilu gubernur. Ia menggarisbawahi kesatuan pemilu ini sebagai satu kesatuan yang kompak.

Nur Hidayat Sardini yang juga dosen ilmu politik Undip menyebut tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif bisa menjadi referensi krusial dalam menghadapi Pilgub 2024. Ia menekankan peran tokoh partai politik sebagai pemegang tiket pencalonan.

“Dalam konteks Jateng, potensi lima partai dalam pemilihan gubernur dengan PDIP menonjol karena dukungan pemilihnya yang signifikan, menyumbang 21% suara pada Pilpres 2019,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar keberhasilan individu yang terafiliasi dengan PDIP, seperti Hendrar Prihadi atau akrab disapa Pak Hendi, bisa dilihat dari keterlibatannya dalam proses pemilu.

“Kesuksesan pemerintahan Hendi di Kota Semarang menjadikannya kandidat yang potensial, mengingat kecenderungan historis PDIP yang mendukung tokoh-tokoh dalam posisi kepemimpinan,” bebarnya.

Nur Hidayat Sardini juga menilai prospek partai lain menilai PKB punya peluang menjanjikan. Ia secara spesifik menyebut Gus Yusuf, sang ketua partai, sebagai tokoh yang memiliki dimensi politik kuat dan basis dukungan yang besar.

Melihat partai-partai lain seperti Golkar, Gerindra, dan Nasdem, Sardini melihat Gerindra mendapat manfaat dari dampak pencalonan Prabowo dalam pemilihan presiden. Selain itu, dukungan 12% untuk Nasdem memberi partai ini posisi penting dalam pemilihan gu-

bernur.

Berbeda dengan biasanya, Sardini mengamati terbatasnya keterlibatan individu sektor swasta, seperti pengusaha, dalam pencalonan gubernur selama 5-10 tahun terakhir.

“Kita berharap munculnya tokoh-tokoh baru, mencontohkan Irwan Hidayat, pengusaha sukses yang memiliki reputasi bisnis positif,” tambahnya.

Terakhir, Sardini menyarankan untuk mempertimbangkan nama Abdul Kholik, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai sosok muda yang memiliki visi jelas untuk memimpin Jawa Tengah menuju kemajuan.

Mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa saat ini, ia belum mempertimbangkan keterlibatannya dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2024.

“Fokus saat ini ter-

pusat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tahun yang sama,” ulasnya.

Dalam sebuah diskusi dengan para pimpinan dan senior di Semarang, Hendrar Prihadi menyatakan bahwa perhatian utama mereka saat ini adalah mencapai ‘hattrick’ kemenangan PDI Perjuangan selama tiga kali berturut-turut dan memastikan kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden.

Meskipun namanya sering disebut sebagai salah satu kandidat kuat dari PDIP untuk Pilgub Jateng 2024 dan sudah muncul dalam beberapa survei, Hendi mengungkapkan bahwa ia belum memikirkan kemungkinan tersebut atau mengukur elektabilitasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang itu menyatakan bahwa elektabilitas dan potensi pencalonannya sebagai gubernur masih merupakan hal yang belum dipertimbangkan secara serius.

“Pertimbangan untuk Pilgub Jateng 2024 akan diambil lebih lanjut setelah Pemilu dan Pilpres yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024,” sambungnya.

Sebelumnya, Hendi, sebagai Ketua DPC PDIP Kota Semarang, sedang melakukan konsolidasi kekuatan, termasuk membentuk tim kemenangan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

Hendi menekankan bahwa seluruh unsur PDIP telah sepakat mendukung Ganjar sebagai calon presiden, dan saat ini, fokus mereka adalah bagaimana memenangkan Ganjar sebagai Presiden untuk periode 2024-2029.

“Keputusan mengenai calon gubernur yang akan diusung oleh PDIP masih menunggu kepastian hasil koalisi, partai politik baru akan menentukan calon yang akan diusung pada Februari 2024, dan hingga saat itu, Pilgub Jateng masih dianggap sebagai peristiwa yang cukup jauh,” pungkasnya. ●IRY



“Strategi kita berarti semua Caleg harus aktif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan meraih sebanyak mungkin suara di setiap Daerah Pemilihan (Dapil)”



Rusli Kamal Siregar

GENERASI MILENIAL PERKUAT IKLIM DEMOKRASI

Manifestasi demokrasi menunjukkan partisipasi pemuda memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan.

Generasi milenial hadir untuk menciptakan dan memperkuat iklim demokrasi inklusif, menjaga hubungan positif antar generasi muda dan bersama-sama bergerak untuk meningkatkan solidaritas kerjasama.

Proses ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik, dengan penekanan pada keterlibatan pemuda dalam parlemen dan aktif dalam perumusan kebijakan pemerintahan.

Salah satu kader Partai Amanat Nasional (PAN) Marta Dwi Ananda, perempuan muda berusia 23 tahun, dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam Pemilihan Legislatif 2024 di DPRD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Ia akan mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) II, mencakup Kecamatan Nipah Panjang, Rantau Rasau, Berbak, dan Kecamatan Sadu di nomor urut 9.

Marta menegaskan bahwa dirinya, sebagai perempuan lajang, siap memposisikan diri sebagai wakil dari masyarakat pemuda milenial.

“Fokusnya adalah memberdayakan pemuda untuk bertindak, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari visi dan misinya,” jelasnya.

Marta percaya bahwa saatnya bagi generasi muda untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan Tanjabtim yang lebih baik.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jambi, Rusli Kamal Siregar menekankan bahwa keberhasilan PAN terletak pada upaya individu masing-masing Caleg.

Rusli berharap agar setiap Caleg dapat memulai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan dan strategi yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing.

“Strategi kita berarti semua Caleg harus aktif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan meraih sebanyak mungkin suara di setiap Daerah Pemilihan (Dapil),” ungkapnya.

Rusli Kamal menyampaikan harapannya bahwa DPD PAN menargetkan perolehan minimal enam kursi di DPRD Kota

Jambi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dan berambisi untuk mendapatkan posisi kepemimpinan di dalamnya.

“Dengan keyakinan, kita tidak berharap adanya perubahan, karena semuanya sudah kita tetapkan sejak awal,” pungkasnya.

Melalui penelusuran data Daftar Pemilih Tetap (DCT) Pemilu 2024 bahwa ada sedikitnya 98 caleg muda yang berlaga di Pemilu 2024 berusia 21 tahun.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang berusia 21 tahun, yaitu Nina Marlina asal Kota Depok, Jawa Barat, yang akan bersaing di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII.

Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki sembilan caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing dalam Pemilu 2024. Mereka tersebar di berbagai daerah pemilihan, antara lain Jawa Barat IX, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat II, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.

Partai Buruh juga mencatatkan delapan caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Papua Barat, Bali, Jawa Timur IX, Jawa Timur VII, Jawa Tengah V, Jawa Barat IX, dan Sumatera Selatan I.

Partai Demokrat memiliki dua caleg berusia 21 tahun, yakni Rifky Miftahul Achmad dan Fakhri Muhammad Novendi, yang akan bersaing di Dapil Jatim III.

Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) memiliki 25 caleg berusia 21 tahun yang tersebar di berbagai Dapil, seperti Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan I, Jatim VIII

hingga Jatim X, serta Jateng V hingga Jateng IX.

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) memiliki satu caleg berusia 21 tahun, Radikal Osama Siregar, yang akan bersaing di Dapil Riau I dengan nomor urut 2.

Partai Gerindra mencatatkan empat caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Sumatera Selatan II, Jateng IX, Jatim III, dan Kalimantan Tengah.

Partai Hanura juga memiliki dua caleg berusia 21 tahun, yaitu Purbo Widodo dan Komalasari, yang akan bersaing di Dapil Jateng III dan Jateng X.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencatatkan dua caleg berusia 21 tahun, Hana Sausan dan Yahya Ayyash, yang akan bersaing di Dapil Jabar IX dan Sulawesi Tenggara.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencatatkan lima caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Sumatera Utara I, Sumsel II, Lampung II, Jawa Barat IV, dan Sulawesi Tengah.

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mencatatkan 14 caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di berbagai Dapil, seperti Sumatera Barat I, Jabar II dan Jabar III, Jateng II, Jateng VII, Jateng IX, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jatim III, Jatim V, Jatim VII, Jatim X, dan Kalimantan Utara.

Partai Nasdem juga memiliki lima caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Sumatera Utara III, Jateng II, Jatim IV dan Jatim IX, serta Kalimantan Barat II.

Partai Perindo mencatatkan dua caleg berusia 21 tahun, yaitu Muhammad Arjuna Artik Saputra dan Muhammad Irfan Syauqi, yang akan bersaing di Dapil Jabar XI dan Jatim VIII.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mencatatkan dua caleg berusia 21 tahun, yaitu Dhea Umi Choiriyah dan Muhammad Hosni, yang masing-masing akan bersaing di Dapil Sumsel I dan Jatim VIII.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencatatkan sebelas caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Jambi, Sumsel II, Lampung II, Jabar VII, Jateng II, Jatim VIII, Banten II, dan Kalimantan Selatan II. • IRY





“Gas aja Manik! Kita tidak pernah tahu rahasia-rahasia Tuhan dan bantuan-bantuan tangan dari orang-orang baik yang juga punya mimpi dan cita-cita serupa dengan kita untuk politik”

Faisal Basri

DARI DEMONSTRASI AKHIRNYA MASUK POLITIK

Manik Marganamahendra, mantan Ketua Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), kembali menjadi sorotan saat ia bersiap menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jakarta.

Manik maju sebagai calon dari Partai Perindo pada Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan 6 Jakarta Timur yang meliputi wilayah Makasar, Cipayung, Ciracas, dan Pasar Rebo.

Berdasarkan akun media sosialnya, Manik menggambarkan keputusan ini sebagai salah satu pilihan paling rumit dan berat yang harus diambalnya.

“Saya yakin ada yang merasa dikhianati, ada yang tidak setuju, dan ada yang kecewa,” ujarnya di akun Instagram @marganamahendra.

Manik Marganamahendra menjadi berita utama pada tahun 2019 ketika ia mengejutkan publik dengan kritiknya terhadap pejabat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dia terkenal menyebut mereka sebagai “Dewan Pengkhianat Rakyat,” sebuah pernyataan yang dia sampaikan dengan berani di depan anggota majelis.

Dikenal publik sebagai Ketua BEM UI pada tahun 2019 hingga 2020, Manik juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) pada tahun 2018 hingga 2019.

Ia aktif terlibat dalam berbagai aksi protes, khususnya terkait penolakan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Di usianya yang ke-27 tahun, Manik tetap berkomitmen untuk konsisten dan tak tergoyahkan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, seperti yang ditunjukkannya saat berhadapan dengan anggota DPR RI pada tahun 2019.

Menurut Manik, pencalonannya sebagai anggota legislatif bermula dari persepsi adanya kesenjangan antara wakil pemerintah di parlemen dan masyarakat umum, yang menurutnya belum terjembatani secara memadai.

“Sudah terlalu lama kita kekurangan jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput,” kata Manik.

Ia meminta dukungan

dan partisipasi masyarakat dalam proses pencalonannya.

“Hal inilah yang pada akhirnya membuat saya memutuskan bahwa kesadaran politik juga harus dibawa ke meja politik praktis,” ujarnya.

“Jika Anda juga merasa terpenggil untuk bergerak dalam ‘gerakan sistemik’ ini, izinkan saya meminta kritik, masukan, dan saran,” sambungnya.

Manik menakar jika politik itu memang rasanya mahal untuk orang muda minim privilege seperti dirinya. Akhirnya, diakui Manik dirinya sudah menjalankan kapasitasnya sebagai mahasiswa dengan melakukan kritik di luar sistem dan menyampaikan rekomendasi kebijakan.

“Dari dulu saya selalu menyuarakan isu rokok, misalnya pengendalian konsumsi rokok dan tembakau.

Saya melihat minim sekali politik yang menyuarakan isu tersebut,” katanya.

Keputusannya untuk masuk partai politik dan maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) setidaknya bisa membawa warna yang sudah diperjuangkan sebelumnya saat menjadi mahasiswa.

“Bagaimanapun masyarakat sipil berperan dalam membentuk aksi demonstrasi, audiensi, policy brief dan banyak hal lainnya. Namun, tetap ada orang yang punya otoritas untuk menentukan kebijakan tertentu seperti membuat undang-undang. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Pemerintah (PP), mereka adalah wakil rakyat,” bebernyanya.

Lalu yang menjadi banyak pertanyaan terhadap Manik adalah kenapa join Caleg Muda?

Manik menjelaskan bahwa sejatinya manusia butuh belajar setiap saat.

Begitupun dengan dirinya yang butuh belajar lebih detail mengenai isu-isu pencalonan, khususnya biaya kampanye.

“Saya juga ingin tahu gambaran anak-anak muda yang terjun di politik, apakah mereka memiliki latar belakang dan visi yang sama seperti saya? Selain itu, saya merasa Caleg muda bisa menjadi jalan untuk berjejaring dengan teman-teman Caleg muda ataupun di luar Caleg muda yang menjadi narasumber,” ungkapnya.

Profil Manik Marganamahendra

Manik dikenal publik sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada tahun 2019

hingga tahun 2020. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (BEM FKM) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

Mengawali studinya pada tahun 2015 sebagai mahasiswa program Kesehatan Masyarakat, Manik aktif mengikuti Model United Nations Club, Departemen Kajian Strategis dan Aksi BEM FKM UI, Tim Debat FKM UI untuk OIM UI 2016, Senat Indonesia Mahasiswa Kesehatan Masyarakat (ISMKMI), dan Aliansi Organisasi Kesehatan Mahasiswa Indonesia (AOMKI).

Sebelum masuk perguruan tinggi, pria kelahiran Bogor, 11 Desember 1996 ini bersekolah di SDN Semeru 1 Bogor, SMPN 4 Bogor, dan SMAN 1 Bogor. Sebagai lulusan program Kesehatan Masyarakat, Manik fokus pada pengendalian tembakau.

Pada tahun 2020, ia terlibat dalam kerja advokasi dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau hingga awal tahun 2023.

Saat ini beliau aktif terlibat dalam Think Policy Indonesia sebagai pengurus koalisi dan Dewan Pemuda Indonesia Pengendalian Tembakau (IYCTC) sebagai ketua tim.

Pada tahun 2022, ia mengikuti kompetisi Abang Nong Jakarta Timur dan menjadi salah satu finalis, tepatnya runner-up kedua, Abang Jakarta Penuh Harapan.

Belum lama ini, Manik menyempatkan diri bertemu dengan Ekonom dan politikus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Faisal Basri.

Faisal Basri memberikan semangat agar anak muda seperti Manik terus maju karena memang banyak harapan terbentang didepan mata.

“Gas aja Manik! Kita tidak pernah tahu rahasia-rahasia Tuhan dan bantuan-bantuan tangan dari orang-orang baik yang juga punya mimpi dan cita-cita serupa dengan kita untuk politik,”ujarnya.●IRY



“Harus berani memulai mengatakannya tidak pada money politics. Kita harus betul-betul memiliki kesadaran bahwa negara dan bangsa ini milik kita”



Masagus Ahmad Fauzan Yayan SQ

NYALEG KARENA URUSAN UMAT

Ustaz KH Masagus Ahmad Fauzan Yayan SQ memastikan diri maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 mendatang. Dirinya akan memakai perahu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 1 Sumsel nomor urut 2. Cucu Kiai Marogan ini memiliki konsep pembangunan pada jiwa dan raga, sesuai lirik pada lagu Indonesia Raya.

Konsep yang dipakainya merujuk pada gagasan lama Calon Presiden Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Saya sepakat dengan gagasan Pak Anies maju kotanya, bahagia warganya dan semangat pada lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Jadi, urusan jasmani dan rohani harus seimbang,” ujarnya memulai perbincangan dengan Tabloid Info Indonesia.

Dalam pencalonan dirinya, Yayan ingin membangun rohani masyarakat Sumsel menjadi lebih religius dan menguatkan mental jiwa spiritual warga. Hal itu, menurutnya sangat penting dilakukan mengingat banyak kejadian saat ini yang sudah melenceng dari ajaran agama.

“Seperti diketahui saat ini kenakalan remaja sangat tinggi, belum lagi masalah narkoba, kriminalitas dan sebagainya. Saya yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pesantren ingin bisa berkontribusi mengatasi permasalahan tersebut,” ungkap Yayan

Lanjutnya, mengkomodasi dan mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan kepedulian bersama, termasuk peran pondok pesantren dalam mengentaskan permasalahan sosial tersebut.

“Seperti di pesantren yang saya kelola di Talang Betutu, disana kami menggratiskan bagi kaum dhuafa, yatim piatu dan kalangan menengah ke bawah, lansia dan lain-lain. Terpenting bagi kami mereka mau belajar,” jelasnya.

Menurutnya, dengan memberi pendidikan keagamaan kepada masyarakat, diharapkan mampu mengubah pola pikir dan sifat seseorang menjadi lebih baik. Selain itu, Rumah Tahfidz yang dibangunnya juga bisa menjadi new social movement. Saat ini pun, banyak yang ingin membuka cabang dari

luar Sumsel.

Yayan yang pada periode Pileg lalu mundur sebagai Caleg karena harus mengurus Ponpes di Talang Betutu menambahkan, pencalonannya pada tahun ini juga didorong penuh Partai PKS. Dukungan penuh yang diberikan bahkan membuat pergeseran pada komposisi caleg dari PKS.

“Saya dipercaya menjadi Caleg di DPRD Sumsel, sementara Syaiful Fadli di DPRD Kota Palembang. Pencalegan ini juga sudah mendapat restu dari guru saya. Saya terjun ke politik ini tidak ingin setengah-setengah dalam bekerja, karena ini menyangkut urusan umat,” ungkapnya.

Dalam Pemilu nanti, dirinya berharap masyarakat menolak money politics. Jangan karena uang, masyarakat sengsara 5 tahun.

“Harus berani memulai mengatakannya tidak pada money politics. Kita harus betul-betul memiliki kesadaran bahwa negara dan bangsa ini milik kita, pilihlah yang mampu memperjuangkan aspirasi kita. Baik dalam Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota maupun DPD,” cetusnya.

Hal itu juga berlaku dalam Pilpres nanti. Dimana PKS mengusung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Amin). Dirinya menilai, kedua pasangan ini memiliki kompetensi paling baik dibandingkan dua paslon lain.

Cak Imin, disebutnya memiliki basis NU di Jawa Timur (Jatim) karena partai PKB-nya. Sejumlah ulama di Jatim pun sudah memberi dukungan penuh terhadap paslon ini.

“Sudah banyak kiai yang mendukung paslon ini, para santri pun pastinya akan samikna wa atokna (dengar dan patuh) mengikuti kiaiinya,” ungkap Yayan.

la menyebut, jumlah santri ini cukup banyak. Jika solid, maka dirinya yakin kalangan NU dan ponpes akan memberi kontribusi suara tinggi terhadap paslon Amin.

Dirinya pun meminta untuk tidak usil terhadap ulama yang ikut dalam politik. la menilai, founding father bangsa ini ketika memerdekakan Indonesia mendapat dukungan penuh dari ulama.

Ulama menurutnya memiliki peran sebagai pendidik.

“Ulama berperan mendidik dan mengajari umat, tapi jika negara membutuhkan terutama saat Pilpres, dimana akan ditentukan arah bangsa dan negara ke depan,” ungkapnya.

la menyebut, penentuan Amin sebagai Capres-Cawapres yang didukung sudah berdasarkan penilaian yang matang. Dari ketiga paslon itu, bukan dicari yang baik, melainkan yang lebih

baik.

“Amin mendekati kriteria ulama dan Amin ini merupakan yang lebih baik dibandingkan dua paslon lain,” jelas Yayan.

la menyebut, pasangan Amin merupakan gabungan dari agamis dan nasionalis. Keduanya taat dalam agama. Keduanya juga merupakan anak dari pahlawan bangsa.

“Keduanya kombinasi luar biasa, taat beragama dan pastinya nasionalis cinta terhadap bangsa dan negara,” ungkapnya.

Dirinya pun optimis, Amin bisa mendapat hasil suara yang baik di Sumsel. la menilai, banyak masyarakat yang ingin perubahan. Bahkan, banyak pula masyarakat Sumsel yang sebelumnya menjagokan Prabowo Subianto, beralih ke Anies Baswedan.

“Untuk Sumsel yang tadinya mereka adalah pendukung Prabowo bermigrasi ke Anies. Insya Allah Amin menang di Sumsel,” ungkapnya.

Menurutnya, meskipun saat ini survei menunjukkan Amin selalu di peringkat tiga, dirinya tidak mempersoalkan hal itu. Pasalnya, swing voters juga masih tinggi, khususnya di kalangan terdidik yang belum ingin terbuka memberi pilihan.

“Terpenting hasil akhirnya. Terbukti ketika Pilgub DKI Jakarta lalu, survei selalu terbawah, namun ketika debat kandidat dan detik-detik akhir, masuk dalam putaran kedua. Selanjutnya melawan Ahok dan akhirnya menang jauh,” ungkapnya.

la juga menyebut, nomor urut 1 yang didapatkan Amin merupakan sebuah pertanda atau isyarat dari langit. Termasuk dalam hal proses dipilihnya Anies Baswedan menjadi Capres saat ini. Dimana diketahui jika Anies tak memiliki partai, namun diusulkan menjadi Capres.

Kemudian hengkangnya Demokrat dari koalisi yang berlanjut pada masuknya PKB dan Cak Imin dalam koalisi Perubahan. Hal itu menurutnya diluar skenario siapa pun.

“Saya yakin seyakini-yakinnya, jika Allah sudah berkehendak.

Meskipun paslon lain punya harta, pasukan dan sebagainya, jika tidak ditakdirkan jadi ya tidak jadi. Prabowo kita lihat 3 kali maju, di atas kertas melawan Jokowi lalu seharusnya bisa menang, tapi kenyataannya kalah,” katanya.

Soal kemampuan komunikasi dan hubungan internasional, menurut Yayan, Anies memiliki itu semua. Terbukti dari jejak digital dimana Anies kerap kali bicara di skala internasional.

“Apalagi beliau merupakan lulusan Amerika yang menjadi pusat demokrasi dunia. Saya yakin, Anies akan lebih menonjol dibandingkan Capres lain saat debat kandidat,” tukasnya. ●RDR





“Tidak semua generasi muda itu di Indonesia bisa kuliah dan berpendidikan, di perdesaan dan pelosok juga banyak putus sekolah”

Fatkurohman

BESAR BELUM TENTU MENENTUKAN

Suara pemilih di Pemilu 2024 ini akan didominasi kaum milenial dan Gen Z. Ada sebanyak 52 persen kuota suara yang bisa diharapkan bisa menentukan nasib rakyat dengan memilih pemimpin yang benar-benar pas untuk bangsa dan negara.

Namun suara yang besar itu ternyata bukan faktor penentu utama di Pemilu 2024 karena tidak semua pemilih muda bersifat rasional. Dimana dari 52 persen lebih pemilih anak muda ternyata sebagian besar juga belum jelas kemana arah politik mereka bahkan cenderung labil.

Kuota 52 persen suara pemilih muda tidak serta-merta bisa dipertanggungjawabkan sebagai pemilih muda yang rasional melihat pemimpin bangsa dengan rekam jejak. Kondisi ini disebabkan adanya berbagai faktor pendukung lainnya yang membuatnya tidak bisa ditelusuri.

Pemilih muda biasanya arahnya ke rasional karena mereka diharapkan generasi cerdas dan update di medsosnya. Namun semua itu tidak menjamin karena ada faktor pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan.

“Tidak semua generasi muda itu di Indonesia bisa kuliah dan berpendidikan di perdesaan dan pelosok juga banyak putus sekolah,” jelas ungu Koordinator Wilayah Sumsel Publik Trust Institute (Putin) Fatkurohman.

Kondisi Indonesia hari ini dia menyebutkan banyak anak muda menjadi korban hingga terjebak sebagai buzzer di media sosial (medsos). Dampak kurangnya edukasi politik bisa membuat kaum muda juga terjebak di situasi yang salah untuk menerjemahkan informasi politik di sosial media.

“Kadang berdampak mereka akan lebih apatasi bisa-bisa saja pemilih muda banyak yang golput nantinya. Tentunya perlunya edukasi politik karena dinamika politik itu sangat rentan untuk kaum muda kalau tidak paham,” jelasnya.

Peran pemuda seharusnya bisa menjadi agen perubahan atau agent of change untuk menentukan nasib bangsa. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemuda bisa menyalurkan suaranya tidak golput memilih pemimpin yang baik di Pemilu 2024.

Namun nyatanya berapa persentase pemuda yang mampu mewujudkan perubahan bangsa tersebut sekarang belum bisa dipastikan alias masih diragukan.

“Kalau berdasarkan survei Pemilu di Sumsel sebelumnya sebelum suara pemilih muda banyak seperti sekarang masih 40 persen sebelum arah suara banyak ke pemilih religius. Di Sumsel masyarakatnya cenderung religius bukan masyarakat pemilih yang bersifat rasional. Jadi tokoh agama-agama yang akan lebih mereka pilih dibandingkan tokoh politik yang ada,” jelasnya.

Menurutnya untuk pemilih muda arahn-

ya acuan berpolitik kemana masih misterius dan tidak bisa ditebak-tebak terlebih lagi di Sumsel. Terkesan tenang-tenang saja namun saat menentukan pilihan semua sudah ada yang akan dipilihnya pada Pemilu 2024.

Dia menyebutkan ada kemungkinan 20 persen pemilih muda bersifat rasional yang bisa menentukan calon pemimpin dengan rekam jejak. Selanjutnya pemilih muda lebih terpengaruh kepada politik identitas yang menggunakan agama, suku dan budaya.

“Banyak pemilih lebih berpengaruh kepada politik identitas, banyak juga terpengaruh kepada kesukuan terlebih lagi suku Jawa yang ada di Sumsel. Jangan sampai pemilih muda yang rasional justru arahnya terjebak politik identitas bukan melihat rekam jejak para calon pemilihnya,” pungkasnya

Komisioner Divisi Perencanaan Data Informasi KPU Palembang Munawwaroh mengatakan, pihaknya telah menjalankan program untuk menarik pemilih muda maksimal menyalurkan suaranya di Pemilu 2024.

“Kita banyak program untuk merangkul pemilih muda salah satunya dengan memutar film di setiap Universitas-universitas,” kata dia.

Menurutnya berdasarkan data 52 persen pemilih muda banyak didominasi anak muda berumur 17 tahun sampai 24 tahun bahkan ada yang belum berumur 17 ta-

hun namun sudah menikah. Pihaknya tetap berharap pemilih muda bisa menentukan pilihan yang pas untuk perubahan bangsa Indonesia kedepannya.

“Suara pemilih muda tidak bisa ditebak arahnya kemana. Karena juga belum ada survei tentang tingkat pendidikan dan tentang kepribadian pemilih muda di politik. Apa lagi mereka didominasi pemilih pemula,” ucapnya.

Diakunya pemilih muda banyak berkumpul di dunia sosial, mereka juga belajar berpolitik secara manual alias melihat sendiri di sosmed. Pemilih muda Gen Z bahkan ikut berperan meramaikan panggung politik di sosmed dengan membuat beragam konten tentang politik khususnya Pemilu.

“Peran pemilih muda dalam sosialisasi Pemilu juga sangat berdampak banyak anak-anak muda membuat konten di sosmed. Nah saya harapkan mereka tidak memperkeruh suasana politik suarakanlah politik santuy jangan politik pecah belah,” ucapnya

Pemilih muda sekarang ini juga banyak didominasi pemilih pemula yang baru melakukan pencoblosan Perdana di tahun 2024. Kekhawatiran bertambah banyaknya selisweran isu generasi muda juga diisi kaum reba-

han sibuk berselancar di dunia maya tetapi di dunia nyata tidak mau berperan aktif.

“Makanya sekarang kami akan merangkul para pegiat sosmed untuk membuat konten agar kaum rebahan itu diajak ke TPS. Jangan hanya ramai di sosmed ikut berkomentar soal politik tetapi tidak mencoblos nantinya,” katanya.

Sementara Lucky Ramadhan selaku Kepala Departemen Eksternal BEM SI Kerakyatan mengungkapkan, ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan bagi anak muda mulai dari ruang-ruang untuk bersuara. Ruang suara anak muda saat ini mulai minim bahkan dikesiikan. Dominasi politisi senior membuat demokrasi Indonesia terasa tidak mengasyikan bahkan ada upaya pembungkaman untuk anak muda.

Dari penilaian Lucky Ramadhan, ketiga Capres punya karakteristik masing-masing.

Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Amin) secara umum mereka melihat cukup santun dan berwawasan dan menjadi pasangan paling sering kena serangan.

Kemudian ada drama sakit hati di pasangan ini saat Anies Baswedan akhirnya memilih Cak Imin daripada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun secara umum pasangan Amin adalah pasangan yang cocok dan saling menguatkan.

“Kalau dilihat cara berkampanye, mereka membawa politik ini ke arah santai dan santun. Pendekatannya yang lucu dan santai,” jelas Lucky.

Genjar - Mahfud, pasangan yang dipengaruhi langsung PDIP. Masuknya Mahfud MD untuk menutupi sisi lemah Genjar

Pranowo yang terkesan sering melakukan blunder. Sehingga perlu sosok yang kuat dan itu ada pada diri Mahfud MD.

Sebagian besar pemilih rasional lebih condong melihat sosok Mahfud MD yang dianggap mampu dan kuat dibidang penegakan hukum dan berintegrasi tinggi.

“Pasangan ini punya karakter yang kuat terutama pada sosok Mahfud MD. Bagi masyarakat Indonesia, sosok Mahfud seperti superhero di bidang hukum,” urai Lucky.

Prabowo - Gibran, perpaduan tokoh senior dan anak muda sekaligus berstatus sebagai kader PDIP. Pasangan ini paling banyak disorot karena dinilai jomplang dalam segi usia.

Pasangan ini masih terlihat abu-abu karena karakter yang timbul belum terlihat jelas. Sosok Gibran masih dipengaruhi Jokowi sementara Prabowo mulai ada sedikit perubahan. ●RDR



Kehadiran Gibran ke Palembang tentu menjadi semangat kami semua untuk berkiprah lebih besar lagi di Pilpres 2024 ini. Dimana 53 persen pemilih di Pemilu 2024 ini adalah anak muda seperti kami”

Muhammad Ridho



OPTIMISTIS MENANG SATU PUTARAN

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah ditetapkan menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keduanya dalam beberapa kesempatan sudah turun ke lapangan “mempromosikan” diri untuk pemilihan nanti. Bahkan Gibran dalam beberapa waktu terakhir pun sudah menemui para relawan, pendukung dan melakukan blusukan ke pasar.

Seperti saat berkunjung ke Kota Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Sejumlah tempat ia kunjungi dalam lawatannya itu. Gibran yang menggunakan kemeja biru, tampak santai melakukan blusukan ke pasar 26 lilor. Beberapa pedagang bahan pangan ia datangi, bertanya mengenai harga jual dan pasokan distribusinya.

Ia mengorek informasi dan mendengar keluhan sebagai bahan untuk perjuangan maju dalam Pilpres nanti. Dirinya juga memsejumlah sembako yang dijual pedagang.

Blusukan yang dilakukan itu pun membuat antusias warga terutama para emak-emak yang ada di pasar berbondong-bondong mendekati dan mengajak foto selfie.

Kehadiran Gibran ke Palembang atas undangan anak muda dari partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) seperti Tunas Indonesia Raya (Tidar) yang merupakan sayap Partai Gerindra, AMPI, AMPG serta para relawan lainnya.

“Ya ini sebelum ke Jakabaring, kita mampir ke pasar tadi belanja cabai, tomat, sayur, ubi, macam-macam. Luar biasa sekali, pergerakan ekonomi di sini luar biasa. Tadi pedagangnya bilang stabil harganya,” kata Gibran.

Tidak kalah antusias, ketika Gibran mengikuti agenda resminya, yakni konsolidasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Dining Hall Jakabaring Sport City (JSC) dan acara

gabungan bersama relawan di main Atrium OPI Mall Jakabaring.

Acara yang seharusnya berjalan singkat, menjadi molor karena banyak pendukung dan pengunjung mal yang mengajak selfie. Rata-rata adalah kalangan milenial dan Gen Z.

Mereka rela antre, bahkan menyerobot penjagaan ajudan Gibran demi bisa berfoto. Di mall itu, Gibran juga menyempatkan beli donat senilai Rp1,6 juta untuk para anak-anak yang meminta foto bersamanya.

Dalam sambutannya, Gibran tidak bicara banyak dan bertele-tele. Langsung pada tujuan, memotivasi para kader, simpatisan, pendukung dan partai koalisi yang hadir. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menegaskan, jika dirinya dan Prabowo Subianto memiliki survei yang cukup baik dari berbagai lembaga. Bahkan, rata-rata lembaga survei menempatkan keduanya pada posisi atas.

“Kalau teman-teman melihat survei, memang seperti itu (posisi teratas). Nah, kalau trennya seperti itu, maka Pilpres nanti akan berjalan satu putaran,” ujar Walikota Solo ini.

Untuk bisa mempertahankan survei itu, ia meminta semuanya untuk bekerja keras. “Kalau ada berita survei jelek, berarti harus kerja keras lagi,” bebarnya.

Gibran juga meminta untuk memperbanyak kegiatan dan pertemuan di tingkatan masyarakat terbawah, seperti di kampung-kampung hingga ke tingkatan RT.

“Perbanyak pertemuan di akar rumput, pertemuan di kampung-kampung, tingkat RT/RW, desa-desa dan warga. Insya Allah, jika ini dilakukan akan benar-benar satu putaran,” jelasnya.

Ia juga meminta semua pendukungnya untuk tidak merespon berbagai serangan, nyinyiran, fitnah dan bully-an yang ditujukan kepadanya dan pasangannya.

“Didiamkan saja, disenyum saja. Kita lebih baik banyak diam dan perbanyak kerja,” katanya.

Pernyataan yang disampaikan itu diduga terkait perubahan syarat maju Capres dan

Cawapres. Dimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya bisa membuat Gibran maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

“Kalau ada serangan, tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dikomentari dan tidak perlu diklarifikasi,” bebarnya.

Ia juga meminta kepada para pendukung dan tim koalisi untuk tidak menyerang atau menjelekkan pasangan lain.

“Fokus saja pada kemenangan. Sumbangkan seluruh tenaga, yang punya komunitas silakan menyebar virus positif ke komunitasnya. Yang punya follower banyak di sosial media, sebarkan konten-konten yang positif. Jangan tanggap hal-hal negatif, kita fokus mengawal angka survei maka kita akan meraih satu putaran,” tukasnya.

Semakin Semangat

Kehadiran Gibran Rakabuming Raka memberi motivasi tinggi bagi para kader muda partai di Sumatera Selatan. Keyakinan menang satu putaran menjadi semangat bagi generasi muda khususnya yang tergabung di sayap partai.

Muhammad Ridho, Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) yang merupakan elemen sayap Partai Gerindra tentu mendukung penuh Gibran Rakabuming Raka bersama Prabowo Subianto. Bahkan kehadiran Gibran ke Palembang hasil inisiasi para sayap partai di Koalisi Indonesia Maju.

“Kehadiran Gibran ke Palembang tentu menjadi semangat kami semua untuk berkiprah lebih besar lagi di Pilpres 2024 ini. Dimana 53 persen pemilih di Pemilu 2024 ini adalah anak muda seperti

kami. Bahkan kita yakin Gibran sudah mewakili generasi muda dan generasi Z saat ini,” kata Ridho.

Pemuda berusia 23 tahun ini mengungkapkan, untuk Tidar sendiri akan bergerak lebih masif lagi bersama sayap partai lainnya di Koalisi Indonesia Maju. Dimana setelah ini mereka akan melakukan road show ke seluruh wilayah Sumatera Selatan untuk konsolidasi sekaligus sosialisasi pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Bahkan untuk Tidar sendiri akan bergerak hingga ke desa-desa. Bahkan sudah ada 1200 anggota Tidar hingga tingkat pengurus anak cabang atau PAC. Nanti juga akan dilakukan pelantikan PAC Tidar dan pelantikan pengurus partai di tiap kelurahan di Sumatera Selatan,” tegas Caleg DPRD Kota Palembang dari Dapil 6 ini.

Sebagai Ketua Tidar, Ridho optimis pasangan Prabowo-Gibran akan menang di Pilpres 2024 ini termasuk juga di Sumatera Selatan. Untuk mencapai hal tersebut tentu mereka dengan akan bergerak hingga ke tingkat-tingkat desa.

Sehingga apa yang ditargetkan Gibran Rakabuming untuk menang dengan satu putaran saja bisa terjadi. Dimana mereka melihat antusiasme rakyat Indonesia terhadap pasangan Prabowo – Gibran ini cukup tinggi.

“Bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera termasuk Sumsel juga antusiasnya sangat tinggi. Sehingga kami dari Tidar yang merupakan generasi muda Partai Gerindra siap menangkan Prabowo Subianto di Sumatera Selatan” tegasnya. ●RDR





“Secara internal kami mempunyai Inspektorat yang akan memeriksa dan memastikan benar atau tidaknya seorang ASN itu netral atau tidak”

Agus Fatoni

SULIT MENJAGA NETRALITAS ASN DEMI JABATAN

Netralitas aparat sipil negara (ASN) menjadi kekhawatiran berbagai pihak ketika mendekati pesta demokrasi. Banyak yang memandang ajang itu sebagai sebuah kesempatan bagi PNS (pegawai negeri sipil) untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Ketika yang didukung menang, PNS itu akan mendapat posisi strategis di pemerintahan. Namun jika kalah, nasib apes akan terjadi pada ASN tersebut. Bisa-bisa, karirnya mandek selama lima tahun periode jabatan hingga ada pemilihan kembali.

Menjelang pemilihan umum serentak 2024, baik itu pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni mewanti-wanti dan mengingatkan ASN di lingkungan pemerintah provinsi wajib menjaga netralitas, integritas, profesionalitas dan tidak memberi dukungan kepada siapa pun.

Fatoni menegaskan, ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, tidak memihak pada kepentingan tertentu maupun kepentingan apapun. Apabila terdapat ASN di lingkungan Pemprov Sumsel melakukan pelanggaran, maka akan ada mekanisme sanksi sesuai dengan prosedur yang ada.

“Secara internal kami mempunyai Inspektorat yang akan memeriksa dan memastikan benar atau tidaknya seorang ASN itu netral atau tidak. Secara eksternal, sesuai dengan fungsi, pemeriksaan akan dilakukan Bawaslu dan mereka yang akan menentukan apakah terjadi pelanggaran atau tidak,” ujar pria asal Bahuga, Lampung ini dalam Seminar Mengawal Netralitas PNS dan Membendung Hoaks Pemilu 2024 di Hotel Harper.

Biasanya, akan ada klasifikasi pelanggaran yang diputuskan Bawaslu. Seperti pelanggaran sedang, ringan dan berat. “Setelanya baru kita tetapkan sanksinya seperti apa” ungkapnya.

Dijelaskan Fatoni, beberapa hal yang dilarang bagi ASN adalah menjadi peserta kampanye, menggunakan atribut partai, berkampanye menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Baik itu sebelum, selama dan setelah kampanye.

“Tidak boleh juga posting atau share di sosmed. Jadi, ASN itu harus netral, karena ASN ini milik semua, tidak boleh melayani,

semua kita perlakukan sama dan kita beri pelayanan yang sama. Apapun dukungan yang diberikan secara sengaja itu tidak boleh, namanya tidak Netral,” katanya.

Fatoni meminta seluruh ASN ikut berperan menciptakan dan menjaga kondusifitas daerahnya selama pelaksanaan Pemilu. Dengan terlaksananya Pemilu damai dan kondusif, maka keamanan dan kenyamanan akan tercipta. Semuanya bisa menjalankan tugas dan aktivitas dengan baik.

“Kita mengetahui Sumsel ini sebagai daerah yang kondusif, zero conflict ini harus terus kita jaga. kondisi ini sangat menguntungkan bagi kita agar pembangunan bisa berjalan, demokrasi terpelihara, pelayanan publik semakin baik, masyarakatnya sejahtera dan investor semakin tumbuh di provinsi kita ini,” tandasnya

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Kurniawan mengatakan, sampai saat ini Bawaslu belum menemukan ASN yang tidak netral. Dirinya menilai ASN di lingkungan Pemprov Sumsel termasuk kategori sejuk atau kondusif.

Menurutnya, Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN pada Pemilu Serentak 2024 mendatangi mengedepankan fungsi pencegahan. Bila ada pelanggaran, Bawaslu akan menindak.

“Tentunya sanksi disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan serta peraturan Bawaslu,” imbuhnya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Kampanye Pemilu Damai 2024 dengan menerapkan tiga langkah mencegah penyebaran hoaks atau berita palsu.

“Pertama, jangan langsung menyebarkan informasi yang diterima. Kedua, periksa kebenaran informasi yang kita terima dengan memeriksa sumber informasi resmi. Ketiga, pelajari dulu apakah pesan atau informasi tersebut akan bermanfaat jika disebar. Jika informasinya benar namun tidak bermanfaat atau bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan, maka jangan disebar,” ujar Budi Arie.

Menkominfo Budi Arie mengatakan, pencegahan penyebaran hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024 membutuhkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi itu merupakan bagian dalam menciptakan pesta demokrasi lima tahunan

yang berkualitas.

“Ingat rekan-rekan semua, Pemilu 2024 adalah agenda kita semua. Agar penyelenggaraannya bisa kita rayakan bersama, maka dibutuhkan kontribusi dari semua pihak untuk menjaga kualitas pelaksanaannya,” tuturnya.

Dia mengungkapkan Tim AIS Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi sebanyak 117 isu hoaks yang tersebar di berbagai platform media sejak Januari 2022 hingga November 2023.

Hal itu dinilai menjadi salah satu tantangan dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.

“Persebaran hoaks di ruang digital juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sepanjang Januari 2022 hingga 12 November 2023 saja, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi 117 isu hoaks mengenai Pemilu yang ditemukan pada berbagai platform digital,” ungkap Budi Arie Setiadi.

Selain itu, lanjut dia, tantangan yang menjadi isu krusial dalam Pemilu 2024 adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan setiap ASN menjaga netralitas dan tidak

berpihak kepada pengaruh manapun di luar kepentingan bangsa dan negara.

“Upaya mewujudkan ASN yang netral dan profesional demi pemilu yang berkualitas, juga diperkuat melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu No 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,” jelas Menkominfo.

Dalam beleid itu, ASN dilarang mengenakan atribut partai atau bakal calon peserta pemilu, serta dilarang mengikuti kampanye baik secara online maupun offline.

Bahkan, ASN juga dilarang berfoto bersama dengan bakal calon peserta pemilu dan tim sukses untuk menunjukkan keberpihakan.

Untuk itu, Menkominfo telah meminta setiap Pejabat Pembina Kepegawaian ASN diminta untuk membentuk sistem dan tim pengawasan netralitas ASN.

“Sehingga apabila bapak dan ibu menemukan pelanggaran netralitas ASN, dapat melaporkan kepada instansi asal ASN tersebut,” tandas Menkominfo Budi Arie. ●RDR



“Bahkan membagikan uang transport pun diperbolehkan tapi ada batasannya. Uang transport tidak boleh melebihi angka Rp 100 ribu kalau hanya untuk uang makan diperbolehkan”

Kurniawan



BANYAK PESERTA PEMILU MELANGGAR

Setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT), semua peserta kini telah berstatus sebagai peserta Pemilu. Masuknya status itu sebagai penanda mulai diberlakukannya pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dari pengawasan awal saja, ternyata sebagian besar peserta Pemilu melakukan pelanggaran administratif karena secara terang-terangan melakukan kampanye lewat spanduk yang disebar.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi serta luasnya wilayah pengawasan membuat Bawaslu cukup kerepotan melakukan penertiban. Bahkan untuk Kota Palembang saja masih sebagian yang mereka awasi. Sebagian lagi masih dalam proses pengawasan.

Dari hasil pengawasan tersebut ternyata sebagian besar peserta Pemilu melakukan pelanggaran administratif. Hal itu membuat Bawaslu Sumsel juga kerepotan untuk menertibkan spanduk yang melanggar meski telah dibantu Satpol PP.

“Kami bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan memang belum semua mampu kami tertibkan karena memang jumlahnya ribuan dan tersebar di setiap sudut, baik jalan protokol, gang, tembok bahkan di pohon-pohon,” kata Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan.

Dijelaskan Kurniawan, Bawaslu kini telah melakukan penyisiran Alat Peraga Kampanye (APK) ke seluruh wilayah di Sumsel sekaligus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar memasang Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan baik dan

benar.

Dari hasil penyisiran banyak sekali pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu dengan sengaja menampilkan APK yang berisi ajakan-ajakan untuk memilih. Padahal masa ini belum memasuki kampanye.

“Pelanggaran yang banyak kita temukan adalah spanduk yang berisi ajakan untuk memilih, ada simbol coblos di nomor yang dibuat. Termasuk menggunakan kata-kata Mohon Doa dan Dukungan. Itu juga melanggar,” jelasnya.

Meski melanggar lanjutnya, namun Bawaslu tidak memberi sanksi berat karena sifatnya administratif.

Untuk penindakan, Bawaslu mengirimkan surat himbauan penertiban ke partai-partai untuk mengingatkan para kadernya agar tertib. Kemudian menghimbau kepada para peserta Pemilu yang melanggar untuk melepaskan sendiri APK miliknya sebagai bentuk edukasi serta memberi contoh baik kepada masyarakat.

Di sisi lain Bawaslu juga menggandeng Satpol PP daerah untuk menertibkan spanduk-spanduk yang melanggar.

APK itu baru boleh dipasang saat memasuki masa kampanye tanggal 28 November mendatang. Untuk itu Bawaslu sedang melakukan persiapan antisipasi bila terjadi pelanggaran mulai dari jenis hingga penanganannya.

“Bahkan logistik-logistik di KPU sudah beberapa yang datang ke KPU kabupaten/kota. Namun untuk surat suara belum ada informasi kapan dan dimana pencetakannya. Berdasarkan informasi dari KPU Pusat

untuk pencetakan surat suara diserahkan ke KPU provinsi masing-masing. Bahkan untuk pemenang tender pencetakan surat suara kita belum mendapatkan Informasi,” jelas Kurniawan.

Mantan anggota KPU Kota Palembang ini mengungkapkan, ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi peserta Pemilu dalam melakukan sosialisasi seperti membagikan kartu nama, membagikan kalender dan sembako.

“Bahkan membagikan uang transport pun diperbolehkan tapi ada batasannya. Uang transport tidak boleh melebihi angka Rp 100 ribu kalau hanya untuk uang makan diperbolehkan, tapi kalau arahnya sudah memberikan uang untuk mencoblos itu yang tidak diperbolehkan karena itu sudah mengarah ke money politic,” tegasnya.

ASN Boleh Hadir

Terkait soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai banyak mendapat perhatian, Bawaslu juga turut mengamatinya. Meski hingga kini khusus di Sumsel belum ada ASN yang melanggar namun hal itu termasuk sensitif.

Dengan ditetapkannya pasangan calon presiden, DCT maka ada batasan-batasan bagi ASN untuk bersosialisasi. Di sisi lain para peserta Pemilu juga kini tidak bisa sebebas dulu saat masih belum ada penetapan.

“Mereka yang mau mengumpulkan para kepala desa sekarang tidak boleh lagi. Bahkan Kades dan perangkat desa juga tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye,” terangnya.

Di sisi lain mereka juga punya hak pilih dan pilihan. Sehingga ASN, Kades dan perangkat desa lainnya boleh hadir asal tidak menggunakan atribut ASN dan harus di luar jam dinas.

Selain penegasan untuk ASN, Bawaslu juga

mengantisipasi beberapa daerah rawan pelanggaran seperti wilayah perairan, pegunungan dan tempat-tempat terpencil lain yang sulit untuk diakses telekomunikasi.

“Daerah-daerah yang tidak terjangkau internet seperti Kabupaten Empat Lawang dan lainnya juga masuk dalam pengawasan kami karena semuanya dilakukan secara manual sehingga rawan pelanggaran,” terang dia.

Untuk membantu pengawasan ini Bawaslu sudah merekrut tenaga relawan untuk membantu pengawasan di daerah-daerah. Selain melakukan pengawasan, para relawan ini dapat melaporkan bila ada pelanggaran.

Terkait netralitas penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu, KPU dan Mahkamah Konstitusi yang masih diragukan, Kurniawan menilai hal itu biasa dan menjadi motivasi mereka untuk bekerja lebih baik lagi.

“Jadi kami harus menunjukkan sikap netral kepada masyarakat seperti tidak condong kepada peserta Pemilu namun tidak kita pungkiri cela tersebut dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab terkait netralitas penyelenggara Pemilu,” urainya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Andries mengatakan, di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini sosialisasi dengan menggunakan spanduk dan banner di jalan-jalan kurang efektif.

Para peserta bisa memanfaatkan media sosial untuk bersosialisasi sekaligus mengenalkan program dan kegiatan yang mereka lakukan.

Selain itu perlu pendewasaan politik bagi seluruh peserta Pemilu dengan memahami tata tertib yang sudah diatur sebelumnya. Salah satunya dengan memberikan himbauan kepada peserta Pemilu untuk sama-sama tidak melanggar dan merusak citra calon wakil rakyat di mata masyarakat.

“Banyak pelanggaran spanduk-spanduk membuktikan kalau kurang sosialisasi dari penyelenggara dan peserta Pemilu. Mereka memang melanggar tapi tidak perlu memberi sanksi keras karena yang kita bangun itu kedewasaan politik agar demokrasi kita semakin baik,” terang Dosen FISIP Unsri ini.

Di sisi lain para peserta Pemilu juga sadar mana yang boleh seperti APS karena sifatnya sosialisasi bukan memang APK yang memang sudah dilarang. Tanpa kesadaran masing-masing maka pelanggaran akan terus terjadi dan berulang lagi. ●RDR





“Kita fokus kepada agenda kemenangan saja biarlah terjadi apapun, masyarakat Indonesia sudah cerdas untuk menilainya”

Yudha Rinaldi

TIM GANJAR-MAHFUD BERGERAK DIAM-DIAM

Tim Pemenangan Nasional (TPN) koalisi pendukung pasangan capres dan cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan pola pergerakan silent lebih tertutup tapi tepat sasaran di Pilpres 2024.

Pola itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, Ahmad Al-Azhar yang menyebutkan TPN tidak bergerak sembarangan untuk melakukan sosialisasi kemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait mulai panasnya iklim politik di Pilpres 2024.

“Agenda tim tim pemenang sudah ada namun kami tidak ingin bergerak terlihat lebih suka silent. Walaupun silent kalau tepat sasaran lebih efektif dibandingkan terlalu terbuka melakukan sosialisasi kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” kata dia.

Pasca pengundian nomor urut dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nomor urut calon presiden dan wakil presiden 2024, Selasa (14/11/2023).

Ditetapkan nomor urut Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kesempatan awal berhasil mendapatkan nomor urut 1. Selanjutnya giliran kesempatan kedua Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3. Terakhir Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada giliran selanjutnya mendapatkan nomor urut 2.

“Kami bersyukur dapat nomor urut 3 karena muda untuk sosialisasinya hanya tinggal angkat jari 3. Tentunya kami semua koalisi bersyukur dan konsisten kedepannya untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” jelasnya.

Diakuinya sesuai dengan pidato Ganjar saat menerima nomor urut 3 kekhawatirannya juga menjadi kekhawatiran tim pemenang. Hal itu dikhawatirkan adanya ketidakadilan atau demokrasi atau pemilihan jurdil saat proses pemilihan Pilpres 2024.

“Makanya kami harus bergerak dengan efisiensi dan efektifitas jangan sampai jadi dampak yang bisa dijadikan kecurangan yang dibuat-buat. Karena yang diutarakan Ganjar dalam pidato semuanya benar khawatir akan ada ketidaknetralan dalam Pilpres nanti,” jelasnya.

Koalisi TPN harus menjaga nama baik citra Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena drama-drama Korea politik dibuat sudah cukup membuat gerah koalisi. Mereka hati-hati salah langkah bisa membuat rekam jejak buruk kepada citra dua calon yang diusungnya tersebut.

“Terpenting sekarang semua Caleg dari koalisi sudah diperintahkan untuk segera menambahkan foto Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam sosialisasi mereka ke-

pada konstituen. Selanjutnya tanggal 28 November kita bergerak secara silent bersama-sama semua koalisi,” pungkasnya.

Bendahara PDI Perjuangan Sumsel Yudha Rinaldi menjelaskan, pihaknya sudah merapatkan barisan dan mendapatkan nomor urut 3 sama seperti nomor urut partai PDI Perjuangan disebutnya angka keberuntungan di Pilpres.

Lalu PDI Perjuangan optimis bisa cetak hattrick kemenangan Ganjar Pranowo setelah dua kali memenangkan Joko Widodo atau Jokowi menduduki dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia di Pilpres sebelumnya.

“Setelah dua kali menang Pilpres, semoga kita bisa cetak hattrick. Jadi angka 3 ini sangat baik untuk PDI Perjuangan untuk sosialisasikan kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” kata dia.

Diakuinya sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia ke-5 dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pergerakan sosialisasi kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus silent. Mereka lebih memilih melakukan pola senyap dengan sistem jemput bola atau open the door.

“Kita kedepannya lebih suka open the door karena langsung mengenai sasaran dan tepat. Tidak akan melakukan sosialisasi kemenangan secara terbuka atau terang-terangan terkesan asal-asalan,” tuturnya.

Saat ini koalisi mereka mendapat serangan. Salah satunya ada momen Megawati Soekar-

noputri menolak bersalaman dengan Kaesang Pangarep putra Jokowi di momen pengundian nomor urut capres-cawapres di Kantor KPU RI, Jakarta.

Semua itu hanya gorengan orang tertentu dibuat sebuah konten untuk menjatuhkan nama Ketua Umum PDI Perjuangan dan nama baik partai. Mereka hanya bisa diam saja dan masyarakat bisa memilih yang mana benar dan yang salah.

“Sekarang masyarakat sudah tahu itu ternyata tidak benar. Biarlah masyarakat menilai sendiri yang mana yang benar dan tidak benar,” jelasnya.

Dia merasakan konten-konten yang sengaja dibuat untuk keburukan PDI Perjuangan diprediksi tidak akan hanya sampai disitu. Bahkan akan ada serangan konten-konten isu buruk disebarkan ke-

dia sosial untuk menyerang PDIP, Ketua Umum dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

“Kita fokus kepada agenda kemenangan saja biarlah terjadi apapun, masyarakat Indonesia sudah cerdas untuk menilainya,” ungkapnya

Setidaknya semua kekhawatiran Ganjar Pranowo - Mahfud MD sudah disampaikan melalui pidato saat pengambilan nomor urut. Itu sudah cukup menjadi bekal untuk masyarakat Indonesia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Pemilu 2024 ini.

“Semua yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo saat pidato itulah yang benar-benar terjadi di tahapan Pilpres sampai saat ini. Jad itu sudah cukup mewakili kami semua soal keresahan demokrasi, ketidaknetralan dan semuanya. Kedepannya kita fokuskan yang penting-penting saja,” pungkasnya.

Bidik 30 Persen Anak Muda

Pergerakan berbeda dilakukan anak muda simpatisan Ganjar Pranowo yang cukup semangat mensosialisasikan pasangan Capres mereka.

Seperti diperlihatkan relawan Orang Muda Ganjar (OMG) sebagai bentuk dukungan anak muda Sumatera Selatan pada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Faris Alaudin Ketua OMG Sumsel menjelaskan, Orang Muda Ganjar Sumatera Selatan terbentuk berdasarkan hati nurani dan memang juga untuk mendukung dari sosok pasangan calon Presiden Ganjar-Mahfud.

“Mulai dari bawah sampai saat ini OMG sudah terbentuk di 20 wilayah Indonesia sedangkan untuk wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini sudah terbentuk dan lengkap di 17 kabupaten dan kota,” jelas pria yang akrab disapa Faris.

Faris menjelaskan, untuk menaikkan elektabilitas Ganjar dan Mahfud Relawan OMG akan menjadi Garda terdepan untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing terutama di Sumsel.

“Elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud, Insya Allah rakyat sudah melihat dan mampu menilai sosok mana yang mampu memimpin bangsa Indonesia menuju 2045 emas,” terangnya.

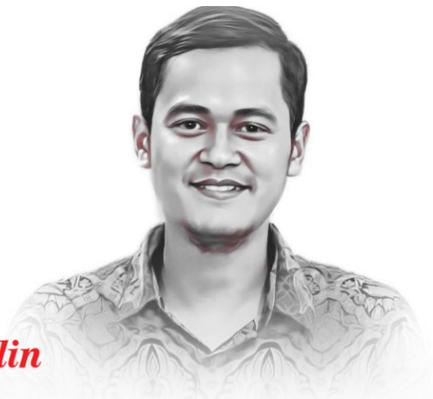
Perpaduan Ganjar - Mahfud menurut OMG Sumsel merupakan perpaduan sempurna. Dimana ada harapan besar kepada pasangan ini terutama dalam supremasi hukum di Indonesia.

“Secara latar belakang utama pendidikan Mahfud sangat lengkap baik dilihat di Legislatif dan Eksekutif. Penanganan hukum di Indonesia sekarang rasanya sangat riskan, apalagi kalau kita menaruh pada orang yang memang tidak mengerti pada dasar secara demokrasi maupun tatanan hukum di Indonesia,” urainya. ●RDR



“Persoalan hukum ini sebenarnya sangat penting apalagi untuk rakyat kecil yang tidak punya uang karena kepastian hukum terkesan mahal”

Muhamad Arifudin



SUPREMASI HUKUM JADI MASALAH UTAMA

Hukum di Indonesia cenderung tidak berpihak kepada rakyat kecil karena bersifat tajam kebawah dan tumpul ke atas yang berdampak pada kesejahteraan wong cilik terus ditekan di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kalaupun ada yang terangkat ke permukaan, jumlahnya tidak banyak dan itupun setelah viral di masyarakat.

Kondisi ini membuat masyarakat hukum menyuarakan siapapun Presiden terpilih di Pilpres 2024 harus mengatasi pekerjaan rumah terbesar yakni lemahnya supremasi hukum atau penegakan dan keadilan hukum di Indonesia.

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (IKA FH UMP) Muhamad Arifudin menyampaikan, mereka memang tidak ikut terlibat dalam politik dan menentukan dukungan kepada salah satu paslon di Pilpres 2024. Namun mereka berharap Presiden terpilih bisa menjamin kepastian hukum karena sangat berdampak kepada bangsa dan negara 5 tahun kedepan.

“Siapapun Presiden yang terpilih nanti masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Penegakan hukum di Indonesia yang tidak adil bisa berdampak untuk semua rakyat Indonesia khususnya wong cilik,” kata Kurator dan advokat muda nasional ini.

Menurut dia, keadilan di Indonesia sangat kusut dan tidak berpihak kepada rakyat jelata seperti membuat banyaknya aturan terkesan tumpang tindih. Hal ini tentunya seakan-akan dibuat untuk menguntungkan pihak tertentu.

Kondisi itu membuat keadilan hukum di Indonesia terkesan semu alias tidak ada karena dibentuk aturan aturan baru membentuk keadilan sudah ada.

“Hukum di Indonesia ini over regulasi menjadikan penegakan hukum lemah! Banyak aturan yang tumpang tindih yang beririsan sama tetapi satu aturan itu mengatur lain satunya lagi mengatur lain. Kondisi ini membuat cela penegakan hukum tidak berjalan karena ada dua aturan yang sama,” tegasnya.

Kepastian hukum di Indonesia seakan-akan sengaja dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Semua itu akan berdampak kepada kepastian hukum untuk wong cilik yang berdampak besar bagi kesejahteraan kehidupan mereka.

Menurutnya, hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah sebenarnya sudah ada sejak dulu namun ketegasan pemimpin (Presiden terpilih) yang harus berperan. Makanya siapapun Presiden harus menjadi PR mereka kedepannya.

“Agar wong cilik saat terkena permasalahan hukum mereka bisa mendapatkan kepastian hukum yang salah benar salah yang benar harus benar di mata hukum. Sebab regulasi hukum itu sudah ada na-

mun bisa dipolitisasi oleh oknum tertentu,” tegas dia.

Menurutnya persoalan korupsi atau KKN di Indonesia juga berdampak kepada lemahnya sistem penegakan hukum.

Kondisi itu melemah karena adanya tumpang tindih kebijakan untuk menangani persoalan Korupsi dengan regulasi yang gendut juga terjadi di persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

Sistem penegakan yang lemah diharapkan Presiden terpilih harus menjawab PR besar ini. Korupsi soal penegakan tumpang tindih aturan dan kewenangan negara siapa yang berhak untuk mengatasi korupsi.

Dimana setidaknya ada tiga elemen penindakan korupsi seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, mereka ini memiliki kewenangan yang sama penyidik dan penyelidikan jadi tumpang tindih.

“Seharusnya tegas, siapa yang memiliki kewenangan mutlak agar kepastian untuk penegakan korupsi lebih jelas. Sebab apabila aturan penegakan Korupsi ada namun ada aturan lainnya dengan level undang-undang bingung aturan mana yang benar dan harus ditegakkan,” ungkapnya.

Diakuinya setelah terpilih menjadi Ketua IKA FH UMP periode 2023-2027 dia berencana kedepan akan intens melakukan workshop dan edukasi dengan konsep diskusi tentang hukum. Namun sebelum akan melakukan perbaikan secara internal ke organisasi

di tubuh IKA FH UMP.

“IKA FH UMP kedepannya akan kita bentuk dulu kepengurusan dan membuat sekretariat setelah itu kedepannya selain membangun silaturahmi antar angkat di FH UMP kedepannya akan kita gelar workshop dan diskusi hukum. Tentunya bisa sasaran masyarakat atau edukasi kepada adik-adik kita di FH UMP dan memberikan pembinaan kepada BEM FH UMP lebih kepada edukasi saja,” terangnya.

Presidium IKA FH UMP Redho Junaidi SH menegaskan hukum harus ditegakkan agar masyarakat percaya dengan hukum di Indonesia. Bahkan dia berharap Presiden terpilih harus mengutus pengawas bisa melihat dan kontrol kinerja para penegak hukum.

“Ketika wong cilik banyak mengeluhkan ketidakpastian hukum mereka akan tidak percaya lagi dengan hukum di

negaranya sendiri. Ini PR Presiden untuk mengatasi ketidaknyamanan harus ada kontrol kepada penegak hukum. Kalau boleh saran Presiden membuat badan khusus untuk mengawasi kinerja para penegak hukum agar mereka bisa bekerja secara baik dan bisa menegakkan hukum seadil-adilnya di

lapan-

gan,” tuturnya.

Persoalan hukum sebenarnya banyak sekali disuarakan oleh semua rakyat Indonesia di berbagai lapisan masyarakat dan tingkat daerah perkotaan hingga pedesaan. Supremasi hukum cenderung diperjualbelikan atau kepastian hukum yang tidak ditegakkan bisa berdampak besar kepada kesejahteraan wong cilik.

“Persoalan hukum ini sebenarnya sangat penting apalagi untuk rakyat kecil yang tidak punya uang karena kepastian hukum terkesan mahal,” tegasnya.

Dia menyoroti kasus Korupsi di Indonesia banyak sekali setelah selesai para penegak hukum yang mengatasi persoalan itu mendadak kaya raya. Hal ini tidak terkontrol oleh Pemerintah karena penegak hukum itu memindahkan aset korupsi yang disita seharusnya untuk negara dimiliki mereka secara pribadi dengan proses pemindahan aset.

“Kasus tindak pidana korupsi untuk aset disita untuk dikembalikan ke negara. Namun terkadang dipindahkan ke keluarganya, makanya banyak dari mereka tiba-tiba mempunyai harta fantastis,” tegasnya.

Menurutnya apakah berani para pejabat penegak hukum membuka berapa harta kekayaan sesungguhnya. Karena kita harus tahu berapa harta kekayaan mereka sebenarnya jangan tiba-tiba memiliki harta kekayaan yang fantastis.

“Mereka penegak hukum apakah berani memeriksa sesama mereka sendiri, tidak akan berani! Seharusnya itu dilakukan oleh Presiden terpilih ke depan,” jelasnya

Dilanjutkannya penegakan kasus korupsi harus ditingkatkan oleh Presiden terpilih dengan berani membersihkan pejabat penegak hukum seperti itu. Sebab kasus suap dan KKN juga akan marak terjadi apabila para pejabat penegak hukum bobrok.

“Presiden terpilih harus menyelesaikan PR ini biar perlu dicarikan juga solusinya, apabila masalah digaji harus di naikin. Namun apabila ditemukan yang benar-benar bobrok harus dibuang percuma saja kalau memberantas korupsi pejabatnya penegak hukum juga korupsi aset yang disita,” ungkapnya

Persoalan hukum di Indonesia nilainya sangat penting diperbaiki oleh Presiden terpilih karena untuk memperbaiki bangsa dan negara berdampak dari sektor supremasi hukum di Indonesia. Mereka juga sebagai advokat melihat banyaknya wong cilik tersandung kesejahteraan secara pribadi karena bermasalah terhadap hukum tetapi tidak mendapatkan keadilan.

“Persoalan hukum itu seakan-akan dinilai tidak penting namun apabila kita tersandung kasus hukum itu bisa berdampak kepada kehidupan manusia itu sendiri. Jadi wajar kalau wong cilik sangat mendambakan kepastian hukum di Indonesia ditegakkan seadil-adilnya. Jangan ada lagi masalah hukum hanya untuk orang-orang beruang kepastian hukum hak semua warga negara Indonesia,” jelasnya. ●RDR





“Kan kami pengen yang pertama. Daftar aja pertama, urutan nomor pertama, dapat juga insya Allah menang pertama”

Muhammad Syaugi Alaydrus

PILOT PESAWAT TEMPUR JADI KAPTEN TIMNAS AMIN

Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akhirnya diumumkan ke publik. Koalisi Perubahan menunjuk Marsekal (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai Kapten Timnas Anies-Muhaimin.

Penunjukkan Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai Kapten Timnas Anies-Muhaimin diharapkan bisa membawa pasangan Amin memenangkan Pilpres 2024.

Calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menjelaskan, keputusan penunjukkan mantan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) itu sebagai Kapten Timnas Amin sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan.

Dia mengungkapkan, Koalisi Perubahan mengangkat pria yang akrab disapa Top Gun itu karena sudah memiliki banyak pengalaman yang mumpuni untuk bisa membantu kemenangannya di Pilpres 2024.

“Kapten utama atas nama Marsekal (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus. Beliau sudah punya banyak pengalaman dalam pengelolaan SAR, sudah punya pengalaman kepemimpinan juga, kalau dilihat dari CV-nya di tempat beliau bekerja hampir semua jadi pimpinan,” ungkap Anies dalam konferensi pers pengumuman Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 14 November 2023.

Penunjukkan Syaugi sebagai Kapten Timnas AMIN disambut baik oleh seluruh partai pendukung pasangan Anies-Muhaimin, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di sisi lain, masyarakat pun bertanya-tanya mengenai sosok Muhammad Syaugi Alaydrus yang ditunjuk sebagai Kapten Timnas Aies-Muhaimin. Sebab, posisinya memiliki peranan yang sangat penting untuk mengantarkan Amin meraih kemenangan di kontestasi 2024.

Profil Muhammad Syaugi Alaydrus

Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus yang dijuluki Top Gun ini lahir pada 10 Desember 1960. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Muhammad Syaugi Alaydrus merupakan cucu dari salah pendiri pusat pendidikan Islam di Jakarta, yakni Habib Al Abdurrahman As Saqaf.

Syaugi menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1984. Perjuangannya dalam menyelesaikan pendidikannya membuahkan hasil yang moncer. Akhirnya, Syaugi menyabet gelar lulusan terbaik atau Adhi Makayasa.

Setahun kemudian, Syaugi melanjutkan pendidikannya di Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Sekkau) pada 1985. Sekkau sendiri merupakan pendidikan pengembangan umum tingkat pertama bagi para perwira TNI AU yang telah selesai mengikuti pendidikan lanjutan kecabangan atau setingkat.

Tidak hanya sampai di situ, Syaugi selanjutnya meneruskan pendidikannya ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) pada 1992. Seskoau merupakan jenjang pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI AU, Pendidikan Operasi Matra Udara, yang melaksanakan pengkajian dan pengembangan doktrin serta kemampuan dan kekuatan matra udara.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di AAU, Syaugi langsung bergabung di tim penerbangan andalan AAU. Karirnya moncer ketika bergabung di tim penerbangan andalan. Akhirnya dia masuk jajaran Perwira TNI yang mahir dalam menerbangkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat.

Selama kurang dari 11 tahun atau tepatnya pada 1985-1996 menjadi

pilot pesawat tempur, Syaugi dipercaya untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan TNI AU. Pertama kalinya, Syaugi dipercaya menjadi Pangkosekhanudnas IV/Biak pada 2010.

Karirnya pun tidak berhenti di situ. Setahun kemudian, Syaugi dipercaya menjadi Komandan Lanud Iswahyudi pada 2011, dan menjadi Pangkoopsau I pada 2012.

Karirnya pun terus cemerlang di mana selama kurang lebih 2 tahun Syaugi dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) Kementerian Pertahanan pada 2014-2017.

Karirnya kian moncer saat menjabat Dirjen Renhan Kemenhan, Syaugi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi marsekal bintang 3.

Selanjutnya, selama berkarir di Kemenhan, Presiden Joko Widodo mengangkat Syaugi menjadi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pada 2017. Selama menjabat sebagai Kepala Basarnas, Syaugi juga pernah menangani beberapa kasus kecelakaan. Salah satunya pada saat peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkalping pada 2018.

Saat menangani jatuhnya pesawat Lion Air JT 610, Syaugi selaku Kepala Basarnas langsung mengerahkan anak buahnya untuk melakukan pencarian terhadap penumpang burung besi tersebut. Akhirnya, tidak berselang lama, Syaugi pensiun sebagai perwira TNI AU. Setelah tidak lagi aktif di kesatuan, Syaugi dipercaya mengemban jabatan sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta pada 2019-2022. Kemudian, berselelah setahun, pada 2023, dipercaya oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Kapten Karir politik dari sini.

Strategi

Timnas AMIN

Setelah mendapatkan kepercayaan

cayaan menjadi Timnas AMIN, Syaugi langsung melakukan beberapa strategi untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Syaugi mengungkapkan bahwa setelah ditunjuk sebagai Timnas AMIN, dirinya langsung melakukan konsolidasi dengan Wakil Kapten Timnas dan seluruh jajarannya.

“Sekarang ini kami menyatukan dulu. Kapten itu ada Co-Captain. Nah, itu nanti kami bagi tugas,” kata Syaugi, Selasa, 14 November 2023.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini seluruh jajaran Timnas AMIN akan terus melakukan konsolidasi demi memperkuat internal dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dia ingin Timnas yang sudah bentuk ini berjalan sesuai dengan harapan.

“Bisa menjadi kesebelasan yang efektif dan efisien. Itu dulu,” kata Syaugi.

Dia percaya bahwa Timnas yang sudah dibangun ini sudah dari kata cukup. Dia meyakini Timnas AMIN bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tidak hanya itu, Timnas AMIN juga diminta untuk terjun langsung ke masyarakat. Hal itu dilakukan untuk memperkenalkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara langsung ke masyarakat.

“Kita kolaborasi, kita gandeng semua untuk melaju atau memberikan serangan untuk menggaet masyarakat seperti itu,” tegas Syaugi.

Dia juga mengaku senang ketika mengetahui pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 01 di Pilpres 2024. Menurutnya, itu merupakan pertanda baik.

Dia meyakini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menang dalam satu putaran. Momor urut 01 yang sudah kantonginya tersebut sesuai dengan harapan Timnas AMIN dan seluruh pendukung pasangan AMIN.

“Kan kami pengen yang pertama. Daftar aja pertama, urutan nomor pertama, dapat juga insya Allah menang pertama,” ujar Syaugi.

- Susunan Lengkap Timnas AMIN:
 Captain : Marsdya (purn) Muhammad Syaugi Alaydrus
 Co-Capt 1 : Sudirman Said
 Co-Capt 2 : Thomas Trikasih Lembong
 Co-Capt 3 : Al Muzzammil Yusuf
 Co-Capt 4 : Nihayatul Wafiroh
 Co-Capt 5 : Azrul Tanjung
 Co-Capt 6 : Nasirul Mahasin
 Co-Capt 7 : Leontinys Alpha Edison
 Co-Capt 8 : Yusuf Muhammad Martak
 Co-Capt 9 : Ki KRT H Lebdo Nagoro Anom Suroto
 Co-Capt 10 : Muhammad Jumhur Hidayat
 Co-Capt 11 : Maksun Faqih
 Co-Capt 12 : Suyoto
 Sekretaris Jenderal : Novita Dewi
 Bendahara : Gede Widiade
 Tim Hukum Nasional : Ari Yusuf Amir

• RDO



“Dengan lengkapnya susunan TKN ini, kami siap untuk gaspol memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang”



Rosan Perkasa Roeslani

GASPOL KAMPANYEKAN PRABOWO-GIBRAN

Koalisi Indonesia Maju resmi mengumumkan susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Raka-buming Raka untuk memenangkan Pilpres 2024 pada 6 November 2023. Rosan Perkasa Roeslani ditunjuk sebagai Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Jika melihat struktur TKN Prabowo-Gibran, komposisi tim ini terbilang cukup gedut dibandingkan dengan Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selain itu, jika ditelusuri lebih jauh, banyak nama beken yang tergabung di dalam TKN Prabowo-Gibran, mulai dari mantan Panglima TNI, mantan Kapolri, beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju, serta para artis dan influencer.

Kendati begitu, seluruh partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran telah menyepakati bahwa yang menahkodai TKN adalah Rosan Roeslani. Mantan Wakil Menteri BUMN ini merupakan sosok yang tidak asing di dunia usaha Tanah Air.

Tokoh-tokoh besar seperti Sandiaga Uno merupakan teman baiknya. Namun, mereka berdua dipisahkan dengan pilihan politik. Sebab, Sandiaga Uno yang kini merupakan kader PPP mendukung pasangan Ganjar-Mahfud Pilpres 2024.

Rosan mengatakan, TKN Prabowo-Gibran yang diumumkan telah mengakomodasi seluruh partai pengusung, relawan baik nasional maupun daerah dan kalangan profesional.

“Dengan lengkapnya susunan TKN ini, kami siap untuk gaspol memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang,” kata Rosan.

Profil Rosan Roeslani

Rosan Roeslani merupakan pengusaha kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968. Dia mengawali bisnis dengan mendirikan penasihat keuangan (financial advisors) pada 1996.

Setahun kemudian pada 1997, perusahaan yang dirintisnya itu mulai berjalan dengan nama PT Republik Indonesia Funding atau lebih dikenal sebagai finance Indonesia.

Saat krisis ekonomi melanda Indonesia, banyak perusahaan nasional mencari orang yang mampu menyelamatkan kembali perusahaan dan bisnis yang dikelolanya. Krisis ekonomi yang melanda menjadi berkah tersendiri bagi Rosan. Kala itu, Rosan dkk banyak dicari oleh para pengusaha dan pemilik modal besar untuk menye-

hatkan perusaha mereka.

Setelah itu, pada 2022, Rosan mengganti nama perusahaannya dari Finance Indonesia menjadi Recapital. Saat ini, dia juga chairman dari Grup Recapital. Perusahaannya itu fokus pada bidang keuangan dan investasi.

Selanjutnya, perusahaannya menggurita ke beberapa sektor, di antaranya bidang industri pertambangan, infrastruktur, properti, hingga media dan komunikasi.

Rekam Jejak Karir

Rosan merupakan alumni Antwerpen European University di Belgia dan Oklahoma State University, Amerika Serikat. Rosan pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020. Rosan juga dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, naluri bisnisnya pun masih terus mengalir. Akhirnya, Rosan mengakuisisi klub sepak bola asal Italia yakni Inter Milan. Kemudian, Rosan dipercaya Presiden Jokowi untuk menggantikan Pahlawan Mansury sebagai Wakil Menteri BUMN.

Perjalanan Bisnis Rosan

Selain menjadi Chairman Recapital Group, Rosan pernah menjabat Presiden Komisaris Komite Investasi Rcpital Asset Management pada 2002-2023. Karirnya pun kian moncer, di mana Rosan dipercaya sebagai Kepala Pemantauan Kreditur Capitalinc Finance Tbk pada 2003-2007.

Hasil dari kerja kerasnya itu, Rosan kembali dipercaya untuk menduduki posisi Presiden Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Indonesia Tbk (Bank BTPN) pada 2005-2007. Lalu, Rosan juga percayakan sebagai Dewan Penasehat PT Lupita Anda dan Komisaris Lativi Mediakarya atau TV One.

Atas kerja kerasnya itu, partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka-buming Raka m e m p e r c a y a i Rosan mengemban tugas sebagai Ketua TKN Prabowo-Gibran. ●RDO



Berikut Susunan lengkap TKN Prabowo-Gibran:

PEMBINA:

Habib Lutfi bin Yahya
Jenderal (Purn) TNI Wiranto
Aburizal Bakrie
Hatta Rajasa
Asep Safuddin (Amanatul Ummah)
Laksamana (Purn) TNI Widodo Adi Sutjipto
Jenderal (Purn) TNI Agum Gumelar
Letjen (Purn) TNI EE Mangindaan
Siti Hardjanti Munandar
Jeffrie Geovanie

PENGARAH

Ketua: Airlangga Hartarto
Wakil Ketua Dewan Pengarah:
Sufmi Dasco Ahmad
Agus Harimurti Yudhoyono
Zulkifli Hasan
Yusril Ihza Mahendra
Anis Matta
Kaesang Pangarep
Ahmad Ridho Sabana
Agus Jabo Priyono
Hashim Djodjohadikusumo
Mahfudhoh Ali Ubaid
Agustadi Sangsoko
Muchamad Jurianto
Ida Bagus Putu Dunia

DEWAN PENASEHAT

Jenderal (Purn) Sutanto
Jenderal (Purn) Sutarman
Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsuodddin
Nurmala Kartini Sjahrir
Ridwan Kamil
Putri K Wardani
Akbar Tandjung
Agung Laksono
Ahmad Sucipto
Gautama Wiranegara
KH Abdul Ghafur
KH Adib Rafiuddin Izza
Kharor Aschal
Prof dr Sjarifuddin Hasan
Edhi Baskoro Yudhoyono
Linda Agum Gumelar
Buya Zulfi Syukur
Deddy Mizwar
Fadli Zon
Mochamad Iriawan
Maheer Algadri
Siti Hediati Soeharto
Widjono Harjanto
Amir Syamsuddin
Andi Alfian Mallarangeng
Muzakir Manaf
Theo Sambuaga
Cicip Sutardjo
Badarrudin
Ahmad Hafizh Thohir
KMS Umar Halim
Nasrullah
Giring Ganesha
Irma Hutabarat
Syaifudin
Dedy Miing Gumilar
Mayjen (Purn) Musa Bangun
Irjen (Purn) Adnas
Komjen (Purn) Boy Rafli Amar
Moechlas Sidik
Habib Umar Assegaf
Ida RSI Agung Wahayan
Habib Ahmad bin Hasan Alaydrus
Misbakhun Munir Cholil
KH Zuhri Yacub
TGKH Lalu Muhammad Zainudin Atsani
KH Muchlich Abbas
KH Hamdi Hasan Al Maliki
KH Zaini Zulfa
KH Agus Masna Shofa Fauzan
KH Masrur ANhar
KH Muzhaff
Tjokorda Gde Agung Sumara Wisesa
Andi Thaswin Abdullah

DEWAN PAKAR

Burhanudin Abdullah (Ketua)
Sudrajad Djwandono
Budiman Sudjatmiko
TB Ace Hasan
Moh Jafar Hafsa

Willem Wandik
Drajad Hari Wibowo
Asman Abnur
Bima Arya Sugiarto
Helmy Yahya

Ketua TKN: Rosan Roeslani
Ketua Koordinator Strategis: Sufmi Dasco
Wakil Ketua:
Ahmad Muzani
Loedwijk F Paulus
Teuku Refly
Eddy Soeparno
Mahfudz Siddiq
Afriansyah Noor
Raja Juli Antoni

Sekretaris TKN: Nusron Wahid
Wakil Sekretaris:
Saleh Dauly
Renanda Bachtar
Fadli Tri Hartono
Fikrah Auliyaurrahman
Azanil Kelana

Bendahara TKN: Tomas A Muliatna Djwandono
Wakil Bendahara TKN:
Pandu Patria Sjahrir
Setiawan Ichlas
Harry Zulnardy
Simon Aloysius Mantiri
Satrio Dimas Adityo

Komandan Alpha (Teritorial): Ahmad Doli Kurnia Tanjung
Wakil Komandan Alpha
Prasetyo Hadi
Irvan Herman
Herman Khaeron
Satria Chandra Wiguna
Fritz Edward Siregar

Komandan Bravo (Komunikasi): Budisatrio Djwandono
Wakil Komandan Bravo:
Nurul Arifin
Eko Hendro Purnomo
Herzaky Mahendra Putra
Fahri Hamzah
Cheryl Tanzil

Komandan Charlie (Penggulangan): Yandri Susanto
Wakil Komandan Charlie:
Andi Achmad Dara
Ferry Juliantono
Umar Arsal
Abdul Rohim

Komandan Delta (Supporting): Irjen (Purn) Yovianes Mahar
Wakil Komandan Delta:
Erwin Izharrudin
Tatyana S. Sutara

Komandan Echo (Hukum dan Advokasi): Hinca Pandjaitan
Wakil Komandan Echo:
Habiburokhan
Supriansa
Adies Kadir
Syarifudin Sudding
Fahri Bachmid

Komandan Fanta (Pemilih Muda): M. Arief Rosyid Hasan
Wakil Komandan Fanta:
Rahayu Saraswati
Dyah Roro Esti
Jerry Sambuaga
Sigit Purnomo Said
Verrel Bramasta

Komandan Golf (Relawan): Haris Rusly Moti
Wakil Komandan Golf:
Immanuel Ebenezer
Wahab Talaoho
Dinuk Ashaf
Fauzi Baadilla
Mangapul Silalahi



“Kita kini berusaha tampilkan (kampanye) yang apa adanya, karena ini menjadi preferensi pemilih milenial dan Gen Z. Mereka ini generasi yang menyukai kejujuran, tidak suka basa-basi dan open minded”

Andika Perkasa

PENGALAMAN DAN JARINGAN MODAL MENANGKAN GANJAR-MAHFUD

Koalisi partai politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah memiliki tim yang siap membantu meraih kemenangan pada Pilpres 2024 yang diberi nama Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, dipercaya oleh seluruh partai pendukung untuk menjadi Ketua TPN Ganjar-Mahfud.

TPN Ganjar-Mahfud diisi oleh tokoh-tokoh yang cukup terkenal, mulai dari mantan Panglima TNI, mantan Wakapolri, dan pengusaha top Tanah Air. Tim tersebut nantinya akan membantu kerja-kerja dari pasangan Ganjar-Mahfud dan menyusun strategi bagi pasangan tersebut ketika melakukan kampanye politiknya di masyarakat.

Profil Arsjad Rasjid

Arsjad Rasjid lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970. Dia merupakan anak dari pasangan HMN Rasjid yang merupakan Purnawirawan TNI AD dan Suniawati. Arsjad hidup dengan kedua orang tuaya yang berbeda keturunan. Ayahnya berdarah Palembang, sedangkan ibunya berdarah Sunda-Tionghoa.

Pada 1990, Arsjad Rasjid menuntut ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineering. Pada 1993, dia juga menyelesaikan pendidikannya di bidang Administrasi Bisnis di Pepperdine University, California, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Bachelor of Science.

Selain itu, Arsjad juga menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Selanjutnya, pada 2013, Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris. Pada

2012, dia menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard

Kenedy School, Amerika Serikat.

Lalu, dia juga menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk Para Pemimpin Global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Pengalaman Arsjad Rasjid

Arsjad Rasjid menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy. Perusahaan itu bergerak di bidang investasi yang terdiversifikasi terkemuka di Indonesia yang berfokus pada pengembangan dan eksploitasi sumber daya alam, infrastruktur, dan berbagai sektor industri strategis lainnya.

Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Indika Energy terus mengembangkan dan mengelola portofolio bisnis yang luas dan beragam, mencakup sektor energi, logistik, infrastruktur, mineral, bisnis hijau, digital, dan kesehatan.

Portofolio bisnis Indika Energy mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arsjad menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy sejak 2005. Di bawah kepemimpinannya, Indika Energy berhasil mengembangkan berbagai proyek strategis dan ekspansi bisnis, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan.

Arsjad berhasil membesarkan aset Indika Energy sekitar tujuh kali lipat dari Rp2,78 triliun menjadi Rp18,28 triliun dalam jangka waktu 6 tahun, yaitu pada periode 2005-2011 melalui strategi akuisisi.

Kontribusi Arsjad Rasjid

Pada periode 2021-2026, ia menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, organisasi yang berfungsi sebagai satu-satunya payung bagi bisnis di Indonesia dan mitra strategis pemerintah.

Selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan perkembangan dan keberhasilan pelaku usaha di berbagai sektor industri di Indonesia. Ia memimpin dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan

Susunan lengkap TPN Ganjar-Mahfud

DEWAN PENASEHAT:
Puan Maharani
Yenny Wahid

Ketua Dewan Pakar: Sandiaga Uno
Ketua TPN: Arsjad Rasjid
Wakil Ketua TPN:
Jenderal (Purn) Andika Perkasa
Komjen (Purn) Gatot Eddy
Letjen (Purn) Joni Supriyanto
Marsekal Madya (Purn) Tatang Hartiansyah
Laksamana Madya (Purn) Desi Albert Mamahit
TGB M Zainul Majdi
Bagas Adhdirga
Rambun Tjajo
Mustar Bona Ventura
Nita Yudi
Eko Sulistyio
Usman M Tokan
Ahmad Basarah
Angela HM Tanoesoedibjo
Benny Rhamdani
Andi Gani Nena Wea
Ammarsjah

Sekretaris Eksekutif TPN: Heru Dewanto

Sekretaris TPN: Hasto Kristiyanto
Wakil Sekretaris TPN:
Moh Arwani Thomafi
Amhad Rofiq
Kodrat Shah
Hotasi Nababan
Sumantri Suwarno

Bendahara Umum TPN: Orias Petrus Moedak
Wakil Bendahara:
Rudianto Tjhen
Sarah
R Arya Permana Graha
Djauhar Mauldi
Henry Suparman

Kepala Staf Pimpinan TPN: Regi Wahyu
Deputi Politik 5.0 TPN: Andi Widjajanto
Deputi Kinetik Teritorial TPN: Komjen (Purn) Luki Hermawan
Deputi Operasi 247 TPN: Denon Prawiraatmadja
Deputi Komunikasi 360 TPN: Prabu Revolusi
Deputi Kinetik TPN: Todung Mulya Lubis
Ketua Tim Pemenangan Muda TPN:
Fitria Aldiani
Dharmaji Suradika

kan iklim usaha yang kondusif, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arsjad berfokus pada peningkatan kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam rangka menciptakan kebijakan yang pro-bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ia mendorong inovasi dan pengembangan industri lokal melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan yang ditujukan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hasil dari perjuangannya itu, Arsjad Rasjid berhasil membangun hubungan yang erat dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional, serta memastikan dukungan yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Kepemimpinan dan visinya yang tajam membuat Arsjad dihormati dan disegani sebagai salah satu tokoh bisnis terkemuka di Indonesia.

Melalui peran penting ini, Arsjad Rasjid kembali membuktikan komitmennya untuk memajukan perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Ia menjadi inspirasi bagi para pengusaha dan pebisnis di Indonesia untuk terus berinovasi, bekerja keras, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Perjalanan Politik

Pada rapat pimpinan partai politik pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang digelar di Kantor DPP PDIP, 4 September 2023, Arsjad Rasjid diangkat sebagai Ketua TPN.

Keputusan tersebut diambil atas hasil musyawarah yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

“Ketua TPN, Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan,” kata Hari Tanoe.

Alasan pimpinan partai politik pendukung pasangan Ganjar-Mahfud mengangkat Arsjad karena miliki pengalaman dan jaringan yang sangat luas. Tidak hanya itu, latar belakang Arsjad juga dianggap sangat mumpuni untuk menahkodai TPN.

“Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga network-nya (jaringannya) juga sangat luas,” jelas Hary Tanoe.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi membeberkan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk bisa memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. TPN akan langsung turun ke masyarakat untuk menyampaikan berbagai macam program kerja dan visi-misi yang akan dilakukan pasangan Ganjar-Mahfud jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

“Strateginya turun ke bawah, menyapa rakyat menyampaikan tentang apa dan siapa Ganjar-Mahfud,” kata Zainul Majdi.

Tidak hanya menyosialisasikan program kerja dan visi-misi, TPN juga akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait latar belakang dari Ganjar-Mahfud. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui secara lengkap latar belakang dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres. Sebab, hal itu juga akan memudahkan masyarakat dalam memiliki calon pemimpinnya di masa depan.

“Rekam jejaknya sangat kaya dan juga misinya cocok untuk kebutuhan Indonesia ke depan,” ujar Zainul.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, membeberkan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Salah satunya menggaet kalangan generasi Z, milenial, dan kalangan perempuan.

Mantan Panglima TNI tersebut juga membeberkan strategi utamanya adalah menjalankan kampanye dengan kejujuran. Menurutnya, dengan cara tersebut akan menarik simpati dari masyarakat. ●RDO



“Prabowo yang semula sudah tinggi 37,5 persen, kehadiran Gibran justru membebani, ya mungkin kecil memang ya sekitar satu persen, sehingga turun menjadi 36,2 persen”

Dedi Kurnia Syah



PRABOWO MASIH UNGGUL GANJAR DISALIP ANIES

Elektabilitas calon presiden dan wakil presiden serta partai politik jelang Pemilu 2024 mengalami sedikit perubahan berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) edisi November 2023.

Dalam survei survei terkini, capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, masih menjadi yang paling unggul di angka 37,5 persen. Posisi kedua diisi oleh capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, dengan elektabilitas 32,7 persen menggeser Ganjar Pranowo yang berada di urutan ketiga dengan 28,3 persen.

Elektabilitas cawapres pendamping juga sama unggulnya. Di urutan pertama bertengger nama Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh angka 36,2 persen. Di urutan kedua ada nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang memperoleh angka 34,1 persen. Lalu di urutan ketiga ada nama Mahfud Md yang meraih angka 27,1 persen. IPO juga merilis elektabilitas ketiga capres apabila dibandingkan dengan cawapres masing-masing, di mana hasilnya masih menunjukkan hal serupa. Prabowo tetap unggul dari Anies dan Ganjar.

Namun, elektabilitas Prabowo menurun jika dibandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Elektabilitas Prabowo yang mulanya 37,5 persen, turun menjadi 36,2 persen.

“Prabowo yang se-

mula sudah tinggi 37,5 persen, kehadiran Gibran justru membebani, ya mungkin kecil memang ya sekitar satu persen, sehingga turun menjadi 36,2 persen,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam konferensi pers di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023.

Tren serupa juga terjadi ke Ganjar, di mana elektabilitasnya menurun dalam simulasi sepaket dengan Mahfud MD. Elektabilitas personal Ganjar yang semula 28,3 persen, turun sekitar 1,2 persen menjadi 27,1 persen.

Namun berbeda dengan Anies, yang mencatat kenaikan elektabilitas kala disandingkan dengan Cak Imin. “Begitu disandingkan dengan Muhaimin Iskandar meningkat menjadi 34,1 persen,” ujarnya.

Dedi menambahkan, dalam survei terbaru IPO juga mencatatkan Prabowo meraih elektabilitas tertinggi di kalangan pemilih muda. Capres nomor urut 02 itu meraih elektabilitas sekitar 31,4 persen, disusul Ganjar Pranowo dengan 29,7 persen, dan Anies Baswedan di posisi terakhir sebesar 21,7 persen.

IPO juga merilis hasil survei para cawapres di kalangan pemilih muda. Hasilnya cukup berbeda dengan capres. Muhaimin Iskandar memimpin dengan elektabilitas sebesar 3,1 persen, disusul Gibran dengan 1,8 persen, dan Mahfud MD di posisi terakhir dengan elektabilitas 0,7 persen.

Dedi mengatakan hasil itu menunjukkan kelompok pemilih muda tak memiliki hubungan langsung dengan kandidat anak muda.

“Prabowo yang usianya paling mapan, senior ternyata juga paling tinggi,” kata Dedi. Kemudian, Gibran sebagai sosok paling muda di antara yang lainnya justru memperoleh elektabilitas tak setinggi Prabowo. Dia menduga pemilih Gibran se-

gian besarnya merupakan orang tua, bukan pemilih muda.

“Dengan demikian mungkin, ini hanya saja asumsi ya, pemilih Gibran berarti pemilih bapaknya,” ucap dia.

Dalam skema head to head antara Prabowo dan Anies, catatan IPO menunjukkan Prabowo memperoleh dukungan sebesar 52,1 persen, sedangkan Anies mendapatkan 46,0 persen.

Dalam skema serupa, ketika Prabowo berhadapan dengan Ganjar, Prabowo akan memperoleh dukungan sebesar 51,7 persen, sedangkan Ganjar Pranowo mendapatkan 39,8 persen.

Sementara itu, Anies saat berhadapan dengan Ganjar memperoleh dukungan sebesar 50,5 persen, sedangkan Ganjar mendapatkan 41,7 persen.

Elektabilitas Partai

Di sisi lain, elektabilitas partai politik tetap dipimpin oleh PDIP dengan 23,8 persen. Kemudian Partai Gerindra 16,5 persen dan Partai Kebangkitan Bangsa 9,4 persen.

Sementara, elektabilitas Partai Gerindra menempati posisi teratas berdasarkan pilihan pemilih pemula dan milenial. Partai Gerindra meraih elektabilitas 21,7 persen. Posisi kedua ada Partai Golkar dengan 12,5 persen dan Partai Amanat Nasional (PAN) di urutan ketiga dengan 11,6 persen.

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9,2 persen, PDIP 7,8 persen, Partai Nas-

Dem 6,6 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4,8 persen, Partai Demokrat 2,5 persen, Partai Perindo 1,1 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 1 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 0,4 persen.

Tujuh partai lainnya memiliki elektabilitas nol persen, yakni Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN).

Dedi menyoroti elektabilitas PAN yang bertengger di posisi ketiga di kalangan pemilih muda. Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan elektabilitas PAN naik karena mendapat efek ekor jas dari penguasaan calon presiden di Pilpres 2024.

Dedi menjelaskan, keterpihian PAN yang naik disebabkan mendukung sekaligus mengusung Prabowo Subianto sebagai capres oleh Koalisi Indonesia Maju.

“Keputusan PAN bergabung dengan dengan KIM untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden sudah tepat, karena tingkat elektabilitas Prabowo saat ini juga tertinggi dibandingkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo,” ujar Dedi.

Imbas dari tingginya elektabilitas Prabowo, PAN mendapat tingkat keterpihian yang memenuhi syarat memperoleh kursi di parlemen atau memenuhi parliamentary threshold sebesar 4 persen.

“Dari hasil survei nasional tersebut, PAN menempati posisi keenam dengan meraih poin 6,4 persen, atau naik satu tingkat dibandingkan survei IPO pada periode Juni 2023, saat itu elektabilitas PAN hanya 5,0 persen dan berada di posisi ketujuh,” paparnya.

“Selain itu, popularitas PAN juga turut naik dari 72,5 persen hasil survei IPO Juni 2023, menjadi 74,5 persen,” sambungnya. ● RDO

